

# Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis

*Dinas Tenaga Kerja*

RENSTRA  
2016-2021



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNGPINANG BARAT**  
**DINAS TENAGA KERJA**

**Jl. Kapten Pierre Tendean Telp/Fax. (0742) 21575 Kode Pos 36513**  
**Kuala Tungkal**

## KATA PENGANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis merupakan arah kebijakan pembangunan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang akan menjadi acuan dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun.

Melalui Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis ini diharapkan akan terciptanya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten di Bidang Ketenagakerjaan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat terintegrasi dengan sektor dan sub sektor lainnya guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan daerah dan menjadi akses kontrol masyarakat dalam pengambilan kebijakan. Dengan demikian, kita juga diharapkan akan mampu mengantisipasi tantangan dinamika pembangunan dimasa mendatang dan mampu memenuhi kebutuhan perkembangan teknologi dan isu global yang menjadi komitmen nasional serta akselerasi pembangunan di daerah.

Semoga dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renstra ini bermanfaat bagi kita sebagai penyelenggara pemerintah dan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak terkait, terima kasih.

Kuala Tungkal, Desember 2017

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**H. NOOR SETYO BUDI, S.Sos**

Pembina Utama Muda

NIP. 19611106 198503 1 003

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I       PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II       GAMBARAN PELAYANAN SKPD .....</b>	<b>6</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	6
2.2 Sumber Daya SKPD .....	16
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD .....	29
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ..	34
<b>BAB III      ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ..</b>	<b>37</b>
3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi ...	37
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih.....	38
3.3 Telaah K/L dan Renstra SKPD.....	40
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	72
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis .....	73
<b>BAB IV      TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>74</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran .....	74
<b>BAB V       STRATEGIDAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>78</b>
<b>BAB VI      RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN , INDIKATOR KINERJA,             KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .....</b>	<b>86</b>
<b>BAB VII     KINERJA PENYELANGGARAAN BIDANG             USAHA.....</b>	<b>89</b>
<b>BAB VII     PENUTUP .....</b>	<b>90</b>
Lampiran	

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan membuat Rencana Strategis (Renstra-SKPD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran.

Sebagaimana ketentuan tersebut, Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah rencana pembangunan dalam bidang Bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung yaitu Visi, Misi Bupati terpilih Tahun 2016-2021, Sasaran dan Strategi Pembangunan, Arah Kebijakan Wilayah Pembangunan dan Arah Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Ketenagakerjaan.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi ekonomi yang cukup dapat diandalkan, dengan beragam potensi yang dimiliki menjadikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu daerah dengan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 diatas laju pertumbuhan rata-rata Kabupaten lain di Provinsi Jambi. Oleh karenanya penekanan pada upaya percepatan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat lima tahun mendatang yang didasarkan kepada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode Tahun 2016-2021 yaitu " Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas " Tahun 2021, akan dapat diwujudkan.

satu program prioritas dalam Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021 yang dikaitkan dengan Trisakti ke 2 yaitu Berdikari Dalam Bidang Ekonomi, dengan misi ke 4 yaitu Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan dan misi ke 6 yaitu mengentaskan Kemiskinan dan Pengangguran dengan Penciptaan Lapangan Kerja dan Penguatan Modal, maka selaku SKPD yang dalam pelaksanaan tugasnya melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar bidang Ketenagakerjaan sebagaimana amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka diharapkan dengan upaya dan komitmen yang sungguh-sungguh dari berbagai pemangku kebijakan dan stake holder terkait lainnya, maka kami optimis Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana dimaksud akan dapat diwujudkan melalui berbagai kebijakan strategis yang diimplementasikan ke dalam program kegiatan yang telah digariskan.

Pembangunan dalam bidang Ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan daerah dan nasional, memiliki peranan yang sangat penting dan strategis untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, khususnya dalam aspek membuka seluas-luasnya bagi kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran, pengentasan kemiskinan dan meningkatkan potensi lokal melalui kelompok usaha yang dikembangkan, sehingga dapat mengembangkan lapangan usaha kearah yang lebih baik dan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Negara RI nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekontrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816):

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 3 );
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2916 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD,RPJMD serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
19. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033;
20. Peraturan Daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2006 Nomor 23);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
25. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 62).

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016- 2021 dimaksudkan sebagai Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016- 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan pada Dinas tenaga Kerja sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Barat Tahun 2016-2021 sebagai landasan/pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan penganggarannya, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan merupakan dasar evaluasi serta laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan dan penyusunan garis besar isi dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini diantaranya adalah :

#### **Kata Pengantar**

#### **Daftar Isi**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah , fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Keterkaitan Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L, dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dan dengan Renja Perangkat Daerah.

##### 1.2 Landasan hukum

Memuat Penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, mengemukakan capaian –capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui RPJMD periodesebelumny, dan mengulas hambatan – hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum Pembentukan Perangkat Daerah, Struktur Organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah ditunjukkan untuk menunjuk organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme)

### 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran /target Renstra Perangkat Daerah periode

sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang diratifikasi oleh pemerintah.

Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabl T-C.23 dan tabel T-C.24 dengan format sebagai berikut.

Tabel T-C.23.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah\*).....  
Provinsi/Kabupaten/Kota.....

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)	19)	20)

.....,20.....

Kepala Perangkat Daerah.....

Tabel T-C.24.  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah\*).....  
 Provinsi/Kabupaten/Kota\*\*).....

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)

- \*) diisi dengan nama Perangkat Daerah
- \*\*) diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota
- \*\*\*) diisi dengan kewenangan Perangkat Daerah

Setelah penyajian setia tabel diatas, dikemukakan apa saja interpretasi atas hasil pengisian setiap tabel tersebut.

Setelah penyajian Tabel T-C.23, interpretasi sekurang – kurangnya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan /gap pelayanan, apa pelayanan mana saja target telah dicapai faktor apa sajayang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini , lalu pada mana pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya.

Setelah pengajian Tabel T-C.24, interpretasi sekurang – kurangnya mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realiasi dengan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau yang kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor- faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, misalnya proseur, mekanisme, jumlah dan kualitas personil ( sumber daya manusia), progres pelaksanaan Proram dan sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk

menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah.

#### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap terhadap Renstra K/L dan renstra Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota ( untuk Provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi ( untuk Kabupaten/Kota), hasil telaah terhadap RTRW, dan hasil analisis kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan, besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### **BAB III PERMSALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN PERANGKAT DAERAH**

#### 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan – permasalahan pelayanan perangkat Daerah serta faktor – faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35.

#### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang Terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah( Tabel T-B.35). dipaparkan apa saja faktor –faktor penghambat pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.

Faktor – faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

### 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari Pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L, ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi/kabupaten/Kota.

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada Bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari :

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L
3. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Pernyataan tujuan dan Sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerja disajikan dalam Tabel T-C.25, sebagai berikut.

**Tabel T-C.25.**  
**Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADATAHUN KE -				
				5	6	7	8	9
1	2	3	4					

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan pernyataan strategis dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang yaitu dari Tabel T-C.26

Tabel T-C.2  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

<b>VISI : ( Diisi dengan visi RPJMD periode berkenaan )</b>			
<b>MISI I : ( Diisi dengan misi RPJMD periode berkenaan )</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1. Tujuan I	1. Sasaran 1.1 2. Sasaran 1.2 3. Dst.....	1. Strategi I.1 2. Srategi 1.2 3. Dst.....	1. Arah Kebijakan 1.1 2. Arah Kebijakan 1.2 3. Dst.....
2. Tujuan 2	1. Sasaran 2.1 2. Sasaran 2.2 3. Dst.....	1. Strategi I.1 2. Srategi 1.2 3. Dst.....	1. Arah Kebijakan 1.1 2. Arah Kebijakan 1.2 3. Dst.....
<b>MISI I : ( Diisi dengan misi RPJMD periode berkenaan )</b>			
1. Tujuan I	1. Sasaran 1.1 2. Sasaran 1.2 3. Dst.....	1. Strategi I.1 2. Srategi 1.2 3. Dst.....	1. Arah Kebijakan 1.1 2. Arah Kebijakan 1.2 3. Dst.....
2. Tujuan 2	1. Sasaran 2.1 2. Sasaran 2.2 3. Dst.....	1. Strategi I.1 2. Srategi 1.2 3. Dst.....	1. Arah Kebijakan 1.1 2. Arah Kebijakan 1.2 3. Dst.....
Dst	Dst	Dst	Dst
Dst			

Tabel T-C.26 dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi, misi RPJMD periode berkenaan dengan Tujuan, Sasara, Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses permusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan Rncana Program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompokasaran dan pendanaan indikatif.

Adapun penyajian menggunakan Tabel 6.1 yang bersumber dari tabel T-C.27.

Tabel T-C.27.

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah  
Provinsi /Kabupaten/Kota

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (uotcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Tujuan I																				
	Sasaran I		Program																	
			Kegiatan																	
	Sasaran I		Program																	
			Kegiatan																	
			Dst																	
Tujuan I																				
	Sasaran I		Program																	
			Kegiatan																	
	Sasaran I		Program																	
			Kegiatan																	
			Dst																	

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG USAHA

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan pada Tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Naskah rancangan Renstra Perangkat Daerah selanjutnya disampaikan kepada Kepala Daerah Bappeda untuk diverifikasi.

## BAB. VIII PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA**

Bab ini disusun dengan maksud menguraikan Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja gambaran umum tentang kondisi daerah masa kini, dengan memberikan perhatian utama pada bidang ketenagakerjaan yang akan diimplementasikan melalui kebijakan dan program pembangunan selama lima tahun kedepan.

Ketenagakerjaan lebih diprioritaskan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan kualitas tenaga kerja, pembinaan dan perlindungan ketenagakerjaan melalui kesempatan untuk menjadi wira usaha baru dan mandiri dengan harapan mampu membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lingkungan sekitar.

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendapat Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

##### **1. Kepala Dinas**

- (1) Dinas Tenaga Kerja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Dinas.  
Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan kebijakan, menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja.

Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang dibidang tenaga kerja;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang tenaga kerja;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang tenaga kerja;
- d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang tenaga kerja; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Sekretariat**

- (1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan ketatausahaan meliputi: kerumah tanggaan, kepegawaian, penatausahaan aset, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
- c. pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **3. Subbagian Umum dan Keuangan**

- (1) Sub Bagian Umum dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
  1. Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, tata usaha, pengelolaan aset, kerjasama, humas, arsip dan dokumentasi serta ketatalaksanaan.
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
    - a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran subbag umum dan keuangan;
    - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan keuangan;

- c. melakukan urusan rencana kebutuhan, usulan pengembangan, tanda jasa, kenaikan pangkat dan gaji berkala, cuti, disiplin, evaluasi kinerja, pemberhentian dan pensiun, serta kesejahteraan pegawai;
- d. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, penataan kearsipan dinas dan pengelolaan perlengkapan;
- e. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- f. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut lhp serta penyusunan laporan keuangan dinas;
- g. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
- h. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset dinas;
- i. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan atasan terkait dengan tugasnya.

#### **4. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program**

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  - (2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program.
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai uraian tugas pekerjaan:
    - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
    - b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran dinas;

- c. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja dinas;
- d. menghimpun, mengolah dan menyiapkan bahan evaluasi dan penilaian kinerja dinas;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;
- f. melakukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjP), Rencana Strategis (Renstra), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dinas; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan atasan, terkait dengan tugasnya.

## 5. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

1. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pemberian rekomendasi, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
- b. penyiapan perumusan, petunjuk teknis dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penyusunan sistem, pembinaan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, pemberian izin tenaga kerja, pedoman penilaian, pembatasan penggunaan dan perizinan tenaga kerja asing;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perluasan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja perkotaan dan pedesaan;
- d. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi inventarisasi kebutuhan latihan, pembinaan pencari kerja, menyiapkan standarisasi dan tes perizinan lembaga latihan serta pemantauan lembaga pelatihan kerja

- produktifitas, pelaksanaan pelatihan kerja dan penyaluran Lulusan ke perusahaan dan organisasi yang membutuhkan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **6. Seksi Penempatan Tenaga Kerja**

- (1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang.
  - (2) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Seksi.
- 
- (1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan sistem dan pedoman pembinaan bursa kerja, pemberian izin, penyebarluasan data dan informasi angkatan kerja dan kesempatan kerja lingkup penempatan tenaga kerja.
  - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai uraian tugas pekerjaan:
    - a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
    - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis sistem dan pedoman pembinaan tenaga kerja, pemberian izin tenaga kerja, pedoman penilaian, pembatasan penggunaan dan perizinan tenaga kerja asing;
    - c. melakukan pengumpulan informasi dan mengolah data dalam rangka pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan memberikan rekomendasi perizinan bagi perusahaan pengguna tenaga kerja asing yang bekerja di wilayah kabupaten Tanjung Jabung Barat;
    - d. melakukan pengumpulan, mengolah, menganalisa, dan menyajikan serta menyebarluaskan data dan informasi jabatan ketenagakerjaan;
    - e. melakukan penyiapan penyusunan sistem dan pedoman pembinaan bursa kerja di lembaga pelatihan kerja dan lembaga pendidikan formal, pedoman pengembangan sarana penyuluh dan bimbingan jabatan serta menyelenggarakan pelatihan ketenagakerjaan pada perusahaan – perusahaan dan pencari kerja;

- f. melakukan penyiapan pembinaan pelaksanaan informasi pasar kerja dan bursa kerja serta menyajikan data angkatan kerja, kesempatan kerja dan tingkat pengangguran;
- g. melakukan pembinaan bimbingan analisa jabatan, menyiapkan konsep sistem/metode teknik penggunaan analisis jabatan dibidang ketenagakerjaan; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan, terkait dengan tugasnya.

## **7. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja**

- (1) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang.
- (2) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dipimpin oleh Kepala Seksi.
  - (1) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan, perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja perkotaan dan pedesaan lingkup perluasan kerja.
  - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai uraian tugas pekerjaan:
    - a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perluasan Kesempatan Kerja;
    - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan sistem dan bahan pedoman pembinaan teknologi tepat guna di sektor pertanian dan non pertanian serta perluasan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja perkotaan dan kesempatan kerja pedesaan:
    - c. melakukan bimbingan dan bantuan kepada masyarakat, lembaga-lembaga swasta yang akan atau sedang melaksanakan usaha mandiri:
    - d. melakukan penyiapan bahan monitoring pelaksanaan teknologi tepat guna dan menyebarluaskan data informasi teknologi tepat guna kerja, mandiri dan perluasan kesempatan kerja;
    - e. melakukan pemantaun, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan perluasan kesempatan kerja secara berkala: dan
    - f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan, terkait dengan tugasnya.

## 8. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

- (1) Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang.
  - (2) Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Seksi.
- 
- (1) Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas menyiapkan penyuluhan, bimbingan, penyelenggaraan pelatihan dan kebutuhan latihan pencari kerja lingkup Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
  - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai uraian tugas pekerjaan:
    - a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
    - b. melakukan penyiapan inventarisasi kebutuhan latihan dan bahan pembinaan pelaksanaan Pencari Kerja terhadap Perusahaan;
    - c. melakukan penyuluhan dan bimbingan kepada pengusaha kecil dan menengah dalam rangka meningkatkan produktifitas dan bimbingan dan penyuluhan sertifikasi tenaga kerja;
    - d. melakukan pemantauan lembaga pelatihan kerja produktifitas yang mencakup jumlah, kualitas, lokasi dan fasilitas pelatihan yang dimiliki;
    - e. melakukan koordinasi pelaksanaan pelatihan yang dilakukan oleh BLK/KLK maupun MTUI dalam hal pendaftaran, seleksi, pemanggilan peserta serta Menyalurkan Lulusan ke perusahaan dan organisasi yang membutuhkan
    - f. melakukan penyiapan standarisasi dan pelaksanaan tes dan perizinan lembaga latihan; dan
    - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

## 9. Bidang Hubungan Industri dan Jaminan Sosial

- (1) Bidang Hubungan Industri dan Jaminan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Hubungan Industri dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Hubungan Industri dan Jaminan Sosial mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi di bidang hubungan industri dan jaminan sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang hubungan industri dan jaminan sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja di bidang hubungan industri dan jaminan sosial;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaporan ketenagakerjaan, pendaftaran ijin operasional perusahaan pemberi kerja, penyedia jasa tenaga kerja, verifikasi pencatatan serikat pekerja/serikat buruh, pembinaan peningkatan sarana hubungan industri dan persyaratan kerja dan pembinaan dan verifikasi pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di perusahaan;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengupahan dan jaminan sosial;
- d. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan, penerapan kelembagaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industri;
- e. pelaksanaan pembinaan organisasi pekerja, pengusaha, lembaga kerjasama bipartit dan tripartit, pengupahan dan jaminan sosial;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **10. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja**

- (1) Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang.
  - (2) Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja dipimpin oleh Kepala Seksi.
- 
- (1) Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, fasilitasi, pembinaan dan verifikasi lingkup Hubungan Industrial dan Syarat Kerja
  - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai uraian tugas pekerjaan:
    - a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
    - b. melakukan fasilitasi pelaporan ketenagakerjaan, pendaftaran ijin operasional perusahaan pemberi kerja, penyedia jasa tenaga kerja dan pembinaan peningkatan sarana hubungan industrial dan persyaratan kerja;
    - c. melakukan pembinaan dan verifikasi pengesahan peraturan perusahaan (pp), pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di perusahaan, dan verifikasi pencatatan serikat pekerja/serikat buruh;
    - d. melakukan pemaantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan hubungan industrial dan syarat kerja; dan
    - e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan, terkait dengan tugasnya.

## **11. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial**

- (1) Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang.
  - (2) Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi.
- 
- (1) Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, fasilitasi, pendataan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup Pengupahan dan Jaminan Sosial.
  - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial mempunyai uraian tugas pekerjaan:
    - a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial;
    - b. melakukan fasilitasi kebijakan pengupahan dan jaminan sosial;
    - c. melakukan pendataan dan memfasilitasi pembinaan pengupahan dan kepesertaan jaminan sosial di perusahaan;

- d. melakukan koordinasi dengan kelembagaan badan penyelenggara jaminan sosial dan pemantauan evaluasi data kecelakaan kerja dan pelaksanaan fisik kecelakaan;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengupahan dan jaminan sosial; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

## **12. Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**

- (1) Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang.
  - (2) Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (1) Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai tugas melaakukan penyusunan rencana, fasilitasi kebijakan, pembinaan dan koordinasi lingkup Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
  - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai uraian tugas pekerjaan:
    - a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
    - b. melakukan fasilitasi kebijakan penerapan kelembagaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta pembinaan kelembagaan perusahaan dan permasalahan hubungan industrial di perusahaan;
    - c. melakukan koordinasi dengan pegawai mediator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial sesuai dengan peraturan yang berlaku;
    - d. melakukan koordinasi dengan pelaksana kelembagaan dan para pihak yang terkait permasalahan ketenagakerjaan;
    - e. melaakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
    - f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Tabel 1 : Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/Ruang pada Dinas Tenaga kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Gol/Ruang	PNS	TKS/TKK	Jumlah
1.	IV/c	1	-	-
2.	IV/b	-	-	-
3.	IV/a	1	-	1
4.	III/d	6	-	6
5.	III/c	3	-	3
6.	III/b	2	-	2
7.	III/a	3	-	3
8.	II/d	-	-	-
9.	II/c	2	-	2
10.	II/b	-	-	-
11.	II/a	-	-	-
12.	I/c	-	-	-
13.	TKS	-	-	-
14.	TKK	-	20	20
JUMLAH		19	20	38

Tabel 2 : Jumlah Sarana Perlengkapan pada Dinas Tenaga kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No.	Nama Jenis Barang	Merk Barang	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Jumlah harga	Ket.
	<b>TANAH</b>			<b>1</b>	<b>893.700.000,00</b>	
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah		1982	1	893.700.000,00	TANAH PERKANTORAN
	<b>ALAT ALAT ANGKUTAN</b>			<b>15</b>	<b>432.470.000,00</b>	
2	Sepeda Motor	Honda Tiger	2007	1	18.150.000,00	BH 5947 EZ
3	Sepeda Motor	Shogun 125 NR	2010	1	14.250.000,00	BH 6207 EZ
4	Sepeda Motor	Honda Vario	2011	1	15.200.000,00	BH 6302 EZ
5	Sepeda Motor	Honda Spacy	2012	1	12.260.000,00	BH 6423 EZ
6	Sepeda Motor	Honda Spacy	2012	1	12.260.000,00	BH 6425 EZ
7	Sepeda Motor	Honda Spacy	2012	1	12.260.000,00	BH 6431 EZ
8	Sepeda Motor	Honda Vario	2012	1	13.860.000,00	BH 6508 EZ
9	Sepeda Motor	Honda Mega Pro	2012	1	19.120.000,00	BH 6506 EZ
10	Sepeda Motor	Honda Blade	2013	1	13.185.000,00	BH 6715 EZ
11	Sepeda Motor	Honda Blade	2013	1	13.185.000,00	BH 6729 EZ
12	Sepeda Motor	Honda Blade	2014	1	15.890.000,00	BH 6964 EZ
13	Kendaraan Roda 4	Toyota Kijang Innova	2013	1	266.800.000,00	BH 34 EZ
14	Sepeda Motor	Suzuki A 100	1979	1	450.000,00	BH 6064 AZ
15	Sepeda Motor	Honda Win	1991	1	2.600.000,00	BH 7311 AZ
16	Sepeda Motor	Honda Win	1993	1	3.000.000,00	BH 7781 AZ
	<b>ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR</b>			<b>1</b>	<b>200.000,00</b>	
17	Kunci	-	2007	1	200.000,00	
	<b>ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA</b>			<b>350</b>	<b>963.309.350,00</b>	
18	Dispenser	Polytron	2011	1	1.500.000,00	
19	Kursi stenlist	-	2012	1	385.000,00	
20	Kursi stenlist	-	2012	1	385.000,00	
21	Kursi stenlist	-	2012	1	385.000,00	
22	Kursi stenlist	-	2012	1	385.000,00	
23	Kursi stenlist	-	2012	1	385.000,00	
24	Kursi stenlist	-	2012	1	385.000,00	
25	Kursi Putar	-	2012	1	830.000,00	

No.	Nama Jenis Barang	Merk Barang	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Jumlah harga	Ket.
26	Kursi Putar	-	2012	1	830.000,00	
27	Kursi Besi Lipat	-	2007	1	175.000,00	
28	Kursi Besi Lipat	-	2007	1	175.000,00	
29	Kursi Besi Lipat	-	2007	1	175.000,00	
30	Kursi Besi Lipat	-	2007	1	175.000,00	
31	Kursi Besi Lipat	-	2007	1	175.000,00	
32	Kursi Besi Lipat	-	2007	1	175.000,00	
33	Kursi Besi Lipat	-	2007	1	175.000,00	
34	Kursi Besi Lipat	-	2007	1	175.000,00	
35	Kursi Besi Lipat	-	2007	1	175.000,00	
36	Kursi Besi Lipat	-	2007	1	175.000,00	
37	Sofa Meja Kursi Tamu	-	2012	1	9.000.000,00	
38	Gorden	-	2009	1	750.000,00	10 m
39	Gorden	-	2009	1	750.000,00	10 m
40	Gorden	-	2014	1	300.000,00	
41	Mesin Penghisap Debu	Karcher	2011	1	4.900.000,00	
42	Lemari Es	PANASONIC	2011	1	2.500.000,00	
43	AC	Panasonic	2011	1	3.950.000,00	
44	AC	-	2014	1	4.000.000,00	
45	AC	-	2014	1	4.000.000,00	
46	Kipas Angin Gantung	CMC	1995	1	20.000,00	
47	Kipas Angin	CMC	1998	1	180.000,00	
48	Karpet	-	2007	1	2.500.000,00	50 m
49	Televisi	Sharp	2011	1	5.500.000,00	
50	Sound System	-	2013	1	37.800.000,00	
51	Genset	-	1988	1	85.000,00	
52	Mesin Tik	Resminton	1983	1	400.000,00	
53	Mesin Tik	Olimpia	2002	1	1.200.000,00	
54	Mesin Tik	Sander	1995	1	100.000,00	
55	Mesin Tik	-	1996	1	175.000,00	
56	Lemari Besi	VIP	1989	1	500.000,00	
57	Lemari Besi	Unital	1990	1	65.000,00	
58	Filling Cabinet 4 Laci	Yunika	1985	1	65.000,00	
59	Filling Cabinet 4 Laci	Yunika	1985	1	65.000,00	
60	Filling Cabinet 4 Laci	Unital	1989	1	60.000,00	
61	Filling Cabinet 3 Laci	-	1988	1	45.000,00	
62	Filling Cabinet 3 Laci	Unital	1989	1	65.000,00	
63	Filling Cabinet 3 Laci	Unital	1989	1	50.000,00	

No.	Nama Jenis Barang	Merk Barang	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Jumlah harga	Ket.
64	Sistem Unit Display	-	1995	1	300.000,00	
65	Lemari Kayu	-	2002	1	50.000,00	
66	Lemari Kayu	-	2002	1	110.000,00	
67	Rak Kayu/Kaca/Box Kaca	-	1985	1	75.000,00	
68	Meja Biro	-	1991	1	90.000,00	
69	Meja Biro	-	1993	1	90.000,00	
70	Meja Biro	-	1995	1	175.000,00	
71	Meja Biro	-	1995	1	120.000,00	
72	Meja Biro	-	1999	1	275.000,00	
73	Meja Biro	-	2009	1	1.500.000,00	
74	Kursi stenlist	Futura	1997	1	60.000,00	
75	Kursi stenlist	Futura	1997	1	60.000,00	
76	Kursi stenlist	Futura	1997	1	60.000,00	
77	Kursi stenlist	Futura	1997	1	60.000,00	
78	Kursi stenlist	Futura	1997	1	60.000,00	
79	Kursi stenlist	Futura	1997	1	60.000,00	
80	Kursi stenlist	Futura	1997	1	60.000,00	
81	Kursi stenlist	-	2002	1	143.500,00	
82	Kursi stenlist	-	2002	1	143.500,00	
83	Komputer	Samsung	2007	1	12.884.425,00	
84	Komputer	Samsung	2007	1	12.884.425,00	
85	Kursi Putar RB di GD	-	2012	1	830.000,00	
86	Kursi stenlist	-	2002	1	143.500,00	
87	Kursi stenlist	-	2002	1	143.500,00	
88	Kursi stenlist	-	2002	1	143.500,00	
89	Kursi stenlist	-	2013	1	502.000,00	
90	Kursi stenlist	-	2013	1	502.000,00	
91	Kursi stenlist	-	2013	1	502.000,00	
92	Kursi stenlist	-	2013	1	502.000,00	
93	Kursi stenlist	-	2013	1	502.000,00	
94	Kursi stenlist	-	2013	1	502.000,00	
95	Kursi stenlist	-	2013	1	502.000,00	
96	Kursi stenlist	-	2013	1	502.000,00	
97	Kursi stenlist	-	2013	1	502.000,00	
98	Kursi stenlist	-	2013	1	502.000,00	
99	Kursi stenlist	-	2013	1	502.000,00	
100	Kursi stenlist	-	2013	1	502.000,00	
101	Kursi stenlist	-	2013	1	502.000,00	

No.	Nama Jenis Barang	Merk Barang	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Jumlah harga	Ket.
102	Kursi stenlist	-	2013	1	502.000,00	
103	Kursi stenlist	-	2013	1	502.000,00	
104	Kursi Kayu Panjang	-	1991	1	60.000,00	
105	Meja Rapat	-	1997	1	350.000,00	
106	Meja Rapat	-	2013	1	2.000.000,00	
107	Meja Rapat	-	2013	1	2.000.000,00	
108	Meja Gambar	-	1995	1	1.600.000,00	
109	Kursi Putar Bertangan	-	1985	1	87.500,00	
110	Kursi Putar Bertangan	-	1985	1	87.500,00	
111	Kursi Putar Bertangan	-	1998	1	750.000,00	
112	Kursi Putar	-	1991	1	15.000,00	
113	Kursi Putar	-	1991	1	15.000,00	
114	Kursi Putar	-	1995	1	60.000,00	
115	Kursi Putar Bertangan	-	2012	1	1.475.000,00	
116	Kursi Besi Lipat	-	2007	1	295.000,00	
117	Kursi Besi Lipat	-	2007	1	295.000,00	
118	Kursi Besi Lipat	-	2007	1	295.000,00	
119	Meja Komputer	-	1997	1	75.000,00	
120	Karpet	-	2007	1	5.125.000,00	102,5 m
121	Meja 1/2 Biro	-	1991	1	100.000,00	
122	Meja 1/2 Biro	-	1991	1	100.000,00	
123	Meja 1/2 Biro	-	1991	1	100.000,00	
124	Meja 1/2 Biro	-	1991	1	100.000,00	
125	Meja 1/2 Biro	-	1994	1	75.000,00	
126	Meja 1/2 Biro	-	1995	1	250.000,00	
127	Meja 1/2 Biro	-	1996	1	150.000,00	
128	Meja 1/2 Biro	Standar	2005	1	1.000.000,00	
129	Meja 1/2 Biro	Standar	2005	1	1.000.000,00	
130	Sofa/ Kursi Meja Tamu	Olympic	2002	1	200.000,00	
131	Sofa / Meja Kursi Tamu	-	2009	1	2.491.500,00	
132	Kursi Plastik	Napoly	1994	1	504.000,00	
133	Gorden	-	2013	1	3.000.000,00	20 m
134	Gorden	-	2014	1	3.000.000,00	10 m
135	Gorden	-	2014	1	300.000,00	1 m
136	Gorden	-	2014	1	3.000.000,00	10 m
137	Jam Dinding	-	1998	1	1.200,00	
138	Jam Dinding	-	1998	1	1.200,00	

No.	Nama Jenis Barang	Merk Barang	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Jumlah harga	Ket.
139	AC	Mithociba	2003	1	3.500.000,00	
140	AC	Panasonic	2011	1	3.950.000,00	
141	AC	Panasonic	2013	1	4.000.000,00	
142	AC		2013	1	4.000.000,00	
143	AC	Toshiba	1997	1	1.600.000,00	
144	Kipas Angin Gantung	-	2007	1	200.000,00	
145	Kipas Angin Gantung	-	2007	1	200.000,00	
146	Radio Gram	Yaesu FT	1997	1	250.000,00	
147	Televisi	Sharp	2012	1	3.200.000,00	
148	Loud Speaker (LS)	-	1991	1	65.000,00	
149	Wireless	TOA 641 C	1997	1	150.000,00	
150	Tangga Alumunium	-	2014	1	3.000.000,00	
151	Dispenser	Ipont	1998	1	250.000,00	
152	Dispencer	PANASONIC	2009	1	550.000,00	
153	Tape Recorder	-	1991	1	75.000,00	
154	Lagewagom	-	1996	1	250.000,00	
155	Sutere Cotton Sice	-	1997	1	90.000,00	
156	Jarum Penunjuk	-	2007	1	400.000,00	
157	Teralis Besi utk Jendela Pintu	-	2014	1	13.387.500,00	
158	Tabung Pemadam Kebakaran	Yamato	1999	1	175.000,00	
159	Tabung Pemadam Kebakaran	Yamato	1999	1	175.000,00	
160	Komputer	Epson	1996	1	2.000.000,00	
161	Komputer	Tantung	1996	1	2.148.000,00	
162	Komputer	AP. Ladva	1997	1	1.000.000,00	
163	Komputer	Toshiba	1997	1	1.500.000,00	
164	Komputer	Intel	2003	1	14.000.000,00	
165	Komputer	Samsung	2007	1	12.625.000,00	
166	Lap Top	Toshiba	2007	1	23.100.000,00	
167	Lap Top	Acer	2012	1	9.000.000,00	
168	Printer	Cannon BJC 620	1998	1	300.000,00	
169	Printer	Samsung	2010	1	1.450.000,00	
170	Monitoring PC/Demib Printer	-	1995	1	250.000,00	
171	Meja Kerja/ Meja Pelaksana	-	2007	1	1.300.000,00	
172	Lemari Besi	Brother	2011	1	3.000.000,00	
173	Lemari Kayu 2 Pintu	-	1994	1	150.000,00	

No.	Nama Jenis Barang	Merk Barang	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Jumlah harga	Ket.
174	Kursi stenlist	Futura	1997	1	60.000,00	
175	Kursi stenlist	-	2002	1	143.500,00	
176	Kursi stenlist	-	2002	1	143.500,00	
177	Kursi Putar	-	2012	1	830.000,00	
178	Karpet	-	2007	1	500.000,00	10 m
179	Meja 1/2 Biro	-	1991	1	100.000,00	
180	Meja 1/2 Biro	-	1994	1	75.000,00	
181	Meja Pelaksana	-	2009	1	748.000,00	
182	Gorden	-	2009	1	375.000,00	5 m
183	Gorden / Vitrage	-	2014	1	300.000,00	
184	AC	TCL	2007	1	13.800.000,00	
185	Komputer	Acer	2012	1	7.000.000,00	
186	Komputer	Lenovo	2013	1	9.700.000,00	
187	Lap Top	Toshiba	2011	1	9.790.000,00	
188	Printer	Laser Jet 102	2011	1	1.500.000,00	
189	Printer	HP Laserjet P 1102	2014	1	1.500.000,00	
190	Mesin Tik Elektrik	Nakajima	2014	1	2.500.000,00	
191	Mesin Tik Elektrik	Nakajima	2014	1	2.500.000,00	
192	Lemari Besi	Brother	2011	1	3.000.000,00	
193	Filling Cabinet 4 Laci	Unital	1992	1	65.000,00	
194	Brankas	Gallant	1999	1	1.400.000,00	
195	Lemari Kayu Arsip 3 Pintu	-	2012	1	4.900.000,00	
196	Alat Penghancur Kertas	IDEAL 3104	2011	1	24.850.000,00	
197	Lemari Kayu	-	1991	1	250.000,00	
198	Rak Kayu	Unital	1991	1	50.000,00	
199	Meja Biro	-	1991	1	90.000,00	
200	Kursi stenlist	Futura	1997	1	60.000,00	
201	Kursi stenlist	Futura	1997	1	60.000,00	
202	Kursi stenlist	Futura	1997	1	60.000,00	
203	Kursi stenlist	Futura	1997	1	60.000,00	
204	Kursi stenlist	Futura	1997	1	60.000,00	
205	Kursi Putar	-	2012	1	830.000,00	
206	Meja 1/2 Biro	-	1994	1	75.000,00	
207	Meja 1/2 Biro	-	2009	1	942.500,00	
208	Meja 1/2 Biro	-	2009	1	942.500,00	

No.	Nama Jenis Barang	Merk Barang	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Jumlah harga	Ket.
209	Meja 1/2 Biro	-	2012	1	1.500.000,00	
210	Gorden	-	2009	1	1.125.000,00	15 m
211	Gorden	-	2013	1	1.500.000,00	10 m
212	Gorden / Vitrage	-	2014	1	300.000,00	1 m
213	AC	Panasonic	2011	1	3.950.000,00	
214	Handy Cam	-	2010	1	6.700.000,00	
215	Komputer	Samusung	2008	1	12.750.000,00	
216	Komputer	Compaq Presario	2011	1	9.950.000,00	
217	Komputer	Acer	2012	1	7.950.000,00	
218	Komputer	Acer	2012	1	7.000.000,00	
219	Lap Top	Toshiba	2010	1	13.240.000,00	
220	Lap Top	Toshiba	2011	1	9.950.000,00	
221	Lap Top	Toshiba	2012	1	8.000.000,00	
222	Lap Top	Toshiba	2014	1	8.850.000,00	
223	Printer	Samsung	2010	1	1.450.000,00	
224	Printer	Laser Jet 102	2011	1	1.500.000,00	
225	Printer	Laserjet HL 2130 Brother	2012	1	1.500.000,00	
226	Printer	Laserjet HL 2130 Brother	2012	1	1.500.000,00	
227	Printer	HP Laser Jet P 1002	2012	1	1.500.000,00	
228	Printer	HP Laser Jet P 1002	2012	1	1.500.000,00	
229	Printer	HP Laserjet P 1102	2014	1	1.500.000,00	
230	Printer	Cannon Pixma MP 237	2014	1	1.500.000,00	
231	Scanner	Cannon	2014	1	1.500.000,00	
232	Buffet Kayu/ Kaca	-	2012	1	2.450.000,00	
233	Lemari Kayu Arsip 3 Pintu	-	2012	1	4.900.000,00	
234	Meja Biro	-	1991	1	90.000,00	
235	Kursi Putar	-	2012	1	830.000,00	
236	Meja 1/2 Biro	-	1994	1	75.000,00	
237	Meja 1/2 Biro	-	2009	1	942.500,00	
238	Gorden	-	2014	1	300.000,00	
239	AC	LG	2012	1	3.800.000,00	
240	Komputer	Samsung	2007	1	12.625.000,00	
241	Lap Top/ Note Book	Toshiba	2014	1	8.850.000,00	
242	Lap Top	Toshiba	2010	1	14.350.000,00	

No.	Nama Jenis Barang	Merk Barang	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Jumlah harga	Ket.
243	Printer	Cannon	2013	1	1.500.000,00	
244	Printer	HP Laserjet P 1102	2014	1	1.500.000,00	
245	Mesin Tik	Alineti	1994	1	150.000,00	
246	Mesin Tik	-	1996	1	125.000,00	
247	Filling Cabinet 4 Laci	Yunika	1985	1	65.000,00	
248	Filling Cabinet 4 Laci	Yunika	1985	1	65.000,00	
249	Filling Cabinet 4 Laci	Unital	2000	1	650.000,00	
250	Filling Cabinet 4 Laci	Lion	2005	1	2.500.000,00	
251	Brankas	Ichiban	1986	1	125.000,00	
252	White Board	-	2007	1	980.000,00	
253	Lemari Kayu 2 Pintu	-	2002	1	120.000,00	
254	Rak Kayu / Kaca	-	1997	1	200.000,00	
255	Rak Kayu	-	1997	1	229.500,00	
256	Meja Biro	-	1985	1	20.000,00	
257	Kursi stenlist	Futura	1997	1	60.000,00	
258	Kursi stenlist	Futura	1997	1	60.000,00	
259	Kursi stenlist	Futura	2011	1	425.000,00	
260	Kursi stenlist	Futura	2011	1	425.000,00	
261	Kursi stenlist	Futura	2011	1	425.000,00	
262	Kursi stenlist	Futura	2011	1	425.000,00	
263	Kursi stenlist	Futura	2011	1	425.000,00	
264	Kursi stenlist	Futura	2011	1	425.000,00	
265	Kursi stenlist	Futura	2011	1	425.000,00	
266	Kursi stenlist	Futura	2011	1	425.000,00	
267	Kursi stenlist	Futura	2011	1	425.000,00	
268	Kursi Putar	-	2007	1	1.135.000,00	
269	Kursi Putar	-	2007	1	1.135.000,00	
270	Kursi Putar	-	2012	1	830.000,00	
271	Kursi Putar	-	2012	1	830.000,00	
272	Kursi Putar	-	2012	1	830.000,00	
273	Kursi Putar	-	2012	1	830.000,00	
274	Meja Komputer	-	2011	1	1.585.000,00	
275	Meja Komputer	-	2011	1	1.585.000,00	
276	Meja Komputer	-	2011	1	1.585.000,00	
277	Karpet	-	2007	1	1.875.000,00	37,5 m
278	Meja 1/2 Biro	-	1991	1	100.000,00	
279	Meja 1/2 Biro	-	1991	1	100.000,00	

No.	Nama Jenis Barang	Merk Barang	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Jumlah harga	Ket.
280	Meja 1/2 Biro	-	1994	1	75.000,00	
281	Meja 1/2 Biro	-	2009	1	942.500,00	
282	Meja Pelaksana	-	2009	1	748.000,00	
283	Meja Pelaksana	-	2009	1	748.000,00	
284	Meja 1/2 Biro	-	2012	1	1.500.000,00	
285	Gorden / Vitrage	-	2007	1	3.750.000,00	50 m
286	Gorden	-	2008	1	980.000,00	14 m
287	Jam Dinding	-	1998	1	1.200,00	
288	Lemari Es	Sharp	2012	1	2.500.000,00	
289	AC	Sharp	2011	1	3.900.000,00	
290	Kipas Angin Gantung	CMC	1998	1	30.000,00	
291	Handy Cam	-	2007	1	1.900.000,00	
292	Komputer	-	2005	1	13.495.000,00	
293	Komputer	-	2007	1	12.750.000,00	
294	Komputer	Acer	2011	1	9.900.000,00	
295	Lap Top	Acer	2009	1	14.950.000,00	
296	A.U Intensitas Cahaya	MODEL ANA - F1	2007	1	30.000.000,00	
297	Mesin Tik	Royal	1993	1	180.000,00	
298	Mesin Tik	Sander	1993	1	150.000,00	
299	Mesin Tik	Olympia	2005	1	2.000.000,00	
300	Lemari Besi	-	2007	1	2.900.000,00	
301	Lemari Besi	Yamanaka	2011	1	3.000.000,00	
302	Filling Cabinet 4 Laci	Yunika	1984	1	300.000,00	
303	Filling Cabinet 4 Laci	Unico	1991	1	85.000,00	
304	Filling Cabinet 4 Laci	Unital	1997	1	150.000,00	
305	Filling Cabinet 4 Laci	Unital	1999	1	250.000,00	
306	Filling Cabinet 4 Laci	-	2007	1	2.250.000,00	
307	Filling Cabinet 4 Laci	-	2007	1	2.250.000,00	
308	Filling Cabinet 4 Laci	-	2007	1	2.250.000,00	
309	Filling Cabinet 3 Laci	VIP	1990	1	75.000,00	
310	Brankas	Ichiban	1986	1	125.000,00	
311	Rak Kayu	-	1985	1	50.000,00	
312	Meja Biro	-	1991	1	90.000,00	
313	Meja Biro	-	1997	1	250.000,00	
314	Meja Biro	-	2002	1	25.000,00	
315	Meja Biro	-	2002	1	25.000,00	
316	Kursi stenlist	Futura	1997	1	60.000,00	
317	Kursi stenlist	Futura	1997	1	60.000,00	

No.	Nama Jenis Barang	Merk Barang	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Jumlah harga	Ket.
318	Kursi stenlist	Futura	1997	1	60.000,00	
319	Kursi stenlist	-	2002	1	143.500,00	
320	Kursi Kayu Panjang	160x70x50 cm	2007	1	275.000,00	
321	Kursi Kayu Panjang	160x70x50 cm	2007	1	275.000,00	
322	Meja Rapat	Kayu	2007	1	450.000,00	
323	Lemari Kayu Arsip 2 Pintu	-	2014	1	1.800.000,00	
324	Meja 1/2 Biro	-	2014	1	1.200.000,00	
325	Kursi Putar	-	2012	1	830.000,00	
326	Kursi Putar	-	2012	1	830.000,00	
327	Kursi Putar	-	2012	1	830.000,00	
328	Kursi Putar	-	2012	1	830.000,00	
329	Meja 1/2 Biro	-	1991	1	100.000,00	
330	Meja 1/2 Biro	-	1994	1	75.000,00	
331	Meja 1/2 Biro	-	1994	1	75.000,00	
332	Meja 1/2 Biro	-	2007	1	950.000,00	
333	Meja Pelaksana	-	2009	1	748.000,00	
334	Gorden	-	2009	1	1.500.000,00	20 m
335	Lemari Es	Sharp	2012	1	2.500.000,00	
336	AC	Panasonic	2012	1	8.900.000,00	
337	Kipas Angin	MIYAKO	2008	1	220.000,00	
338	Kipas Angin	PANASONIC	2008	1	220.000,00	
339	Televisi	Sharp	2012	1	4.300.000,00	
340	A.U Debu / Staplex	TFIA	2007	1	49.500.000,00	
341	A.U Kebisingan	Type 6226	2007	1	60.000.000,00	
342	A. U. Ketebalan Ultrasonic	Porsitector UTG	2007	1	45.000.000,00	
343	A.U Kelembaban / Anemometer	-	2007	1	50.000.000,00	
344	Teralis Besi Jendela	-	2009	1	7.500.000,00	
345	Teralis Besi Pintu	-	2009	1	1.960.000,00	
346	Komputer	Acer	2011	1	9.900.000,00	
347	Komputer	Acer	2012	1	7.950.000,00	
348	Jam Dinding	-	1998	1	1.200,00	
349	Lap Top	Acer	2008	1	14.400.000,00	
350	Lap Top	TOSHIBA	2008	1	19.900.000,00	
351	Lap Top	Toshiba	2012	1	8.000.000,00	
352	Printer	CANNON PIXMA	2008	1	1.605.000,00	
353	Printer	Laserjet HL 2130 Brother	2012	1	1.500.000,00	

No.	Nama Jenis Barang	Merk Barang	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Jumlah harga	Ket.
354	Printer	HP Laserjet P 1102	2014	1	1.500.000,00	
355	Hardisk Eksternal	Hitachi HDD	2008	1	1.589.000,00	
356	Mesin Tik	-	1994	1	150.000,00	
357	Filling Cabinet 3 Laci	Harli Mytop	1986	1	150.000,00	
358	Lemari Besi	Unital	1989	1	60.000,00	
359	Meja Biro	-	1991	1	90.000,00	
360	Kursi stenlist	Futura	1997	1	60.000,00	
361	Kursi stenlist	Futura	1997	1	60.000,00	
362	Kursi stenlist	Futura	1997	1	60.000,00	
363	Kursi stenlist	Futura	1997	1	60.000,00	
364	Meja 1/2 Biro	di Gd. Arsip Sekre	2007	1	950.000,00	
365	Gorden / Vitrage	-	2007	1	3.750.000,00	50 m
366	Gorden	-	2008	1	980.000,00	14 m
367	Jam Dinding	-	1998	1	1.200,00	
	<b>ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI</b>			<b>25</b>	<b>102.069.000,00</b>	
368	UPS / Stabilizer	ICA	2012	1	1.000.000,00	
369	UPS / Stabilizer	ICA	2012	1	1.000.000,00	
370	UPS / Stabilizer	ICA	2012	1	1.000.000,00	
371	UPS / Stabilizer	ICA	2012	1	1.000.000,00	
372	UPS	Power Up	2014	1	750.000,00	
373	Projector Infokus	Toshiba	2008	1	27.256.000,00	
374	Kamera Digital	-	1990	1	103.000,00	
375	Kamera Digital	-	1997	1	495.000,00	
376	Kamera Digital	-	2007	1	7.100.000,00	
377	Kamera Digital	-	2008	1	3.000.000,00	
378	Kamera Digital	-	2010	1	4.000.000,00	
379	Kamera Digital	-	2012	1	9.000.000,00	
380	Kamera Digital	Canon	2013	1	8.000.000,00	
381	Kamera Digital	-	2007	1	1.900.000,00	
382	Kamera CCTV	-	2014	1	29.800.000,00	
383	OHP	Elmo	2003	1	4.500.000,00	
384	Amplifier	TOA	1991	1	47.500,00	
385	Amplifier	TOA	1991	1	47.500,00	
386	Amplifier	Karaoke	1992	1	65.000,00	

No.	Nama Jenis Barang	Merk Barang	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Jumlah harga	Ket.
387	Telephone (PABX)	Samsung	1992	1	45.000,00	
388	Telephone	-	1999	1	60.000,00	
389	Hand Set Intercom	Comax TPP	1991	1	50.000,00	
390	Faximile / Telpon	Samsung	1993	1	150.000,00	
391	Faximile / Telpon	Panasonic	1997	1	200.000,00	
392	Faximile / Telpon	Panasonic	2014	1	1.500.000,00	
	<b>BANGUNAN GEDUNG</b>			<b>11</b>	<b>3.325.158.749,50</b>	
393	Bangunan Gedung Kantor Permanen		2015	1	1.688.766.749,50	
394	Konblok Halaman Depan Kantor		2013	1	109.832.000,00	
395	Konblok Halaman Depan Belakang		2013	1	169.850.000,00	
396	Pagar Keliling Kantor		2013	1	279.794.000,00	
397	Gudang Arsip		2013	1	361.000.000,00	
398	Aula Transmigrasi		2002	1	34.560.000,00	
399	Aula Pengawasan		2005	1	199.871.000,00	
400	Rumah Dinas Pegawai		2002	1	44.352.000,00	
401	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain		2016	1	128.378.292,44	Pembangunan Pagar Depan & Papan Nama Kantor (Total Sudah Termasuk Fisik, Perencanaan & Pengawasan)
402	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain		2016	1	96.887.707,56	Pengecoran Halaman Kantor Depan (Total Sudah Termasuk Fisik, Perencanaan & Pengawasan)
403	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain		2016	1	211.867.000,00	Pembangunan Desain Interior Ruang Baru Dinas Sosnakertrans (Total Sudah Termasuk Fisik, Perencanaan & Pengawasan)

No.	Nama Jenis Barang	Merk Barang	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Jumlah harga	Ket.
	<b>JALAN DAN JEMBATAN</b>			<b>1</b>	<b>142.560.000,00</b>	
404	Jalan Khusus		2002	1	142.560.000,00	Jalan Aspal Komplek 100x3,5 m
	<b>INSTALASI</b>			<b>3</b>	<b>80.487.700,00</b>	
405	Jaringan Distribusi Tegangan 1 s/d 20 KVA		2011	1	49.787.700,00	Stavolt SVC 15KVA
406	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Sedang		2012	1	10.900.000,00	Penambahan Amper 4400 Watt
407	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Sedang		2012	1	19.800.000,00	Penambahan Daya Listrik
	<b>Jumlah</b>			<b>407</b>	<b>5.939.954.799,50</b>	

## 2.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah

### 1). Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja

1. Tersalurnya tenaga kerja lokal sebanyak 150 orang pertahun
2. Terserapnya pencari kerja diperdesaan periode tahun 2010-2015 sebanyak 1.584 orang
3. Terlatihnya pencari kerja periode tahun 2010-2015 sebanyak 1.005 orang
4. Angka Partisipasi angkatan kerja periode tahun 2015 70,79 %
5. Jumlah perusahaan yang dimonitor terkait peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan periode 2010-2015 sebanyak 120 perusahaan
6. Angkatan kesempatan kerja tahun 2015 sebanyak 206.071 orang

### b. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Kerja

1. Tersedianya data ketenaga kerjaan
2. terselesainya hubungan industrial dan PHK di perusahaan sebesar 21 % pertahun
3. Persentase realisasi pemeriksaan awal dan berkala terhadap perusahaan periode tahun 2010-2015 sebesar 61 % pertahun

4. Persentase pembinaan LKS Bipartit dan Kelembagaan SP/SB periode 2010-2015 sebesar 61 % pertahun
5. Jumlah perwakilan perusahaan yang mengikuti Bimbingan teknis (Bimtek) tentang prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial selama periode 2010-2015 sebanyak 125 orang
6. Persentase perusahaan yang dipantau dalam melaksanakan UMP, KHL, dan THR keagamaan serta Jamsostek selama periode 2010-2015 sebesar 61 %

Untuk lebih jelasnya capaian kinerja Dinas Tenaga kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2010-2015 dapat dilihat pada tabel T-C.23. tentang Pencapaian Kinerja pelayanan SKPD dibawah ini :

Tabel T-C.23.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD  
Dinas Tenaga Kerja  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)	19)	20)
1	Angka Partisipasi Angkatan Kerja		49,75 %		43,35	44,50	47,20	48,75	49	40	69,05	70,79	70,78	70,79	92,27	155,17	149,98	145,19	144,47
2	Jumlah Perusahaan dimonitor Terkait Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan		120 Perusahaan		25	25	25	25	20	20	20	20	20	20	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00
3	Angka Kesempatan Kerja		115.388 Orang		109.383	110.489	111.629	112.811	114.044	189.208	194.788	199.911	202.189	206.071	172,98	176,30	179,09	179,23	180,69

Setelah memperhatikan uraian tabel 2.1 tentang Pencapaian kinerja pelayanan SKPD 2011-2016 diatas dapat kita ketahui bahwa tingkat capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung jabung Barat periode sebelumnya dapat diasumsikan sudah pada jalur yang benar meskipun masih ada yang belum mencapai sasaran/target akan tetapi ada pula yang melebihi target hal inilah yang menjadi acuan selanjutnya untuk bagaimana pada periode – periode selanjutnya yaitu tahun 2016-2021.

Tabel T-C.24.  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD  
 Dinas Tenaga Kerja  
 Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	486.414.100	630.792.900	632.640.300	722.544.700	546.696.200	463.622.242	617.009.398	598.706.666	662.910.208	539.176.946	95,31	97,81	94,64	91,75	98,62	15.070.525	18.888.676
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	992.870.000	1.265.237.500	2.573.595.000	944.762.000	1.956.487.000	979.779.355	1.233.328.400	2.498.750.500	898.985.064	1.891.578.423	98,68	97,48	97,09	95,15	96,68	240.904.250	227.949.767
Peningkatan Disiplin Aparatur	43.750.000	16.000.000	17.725.000	33.650.000	22.775.000	43.100.000	15.884.000	17.607.000	33.060.000	22.725.000	98,51	99,28	99,33	98,25	99,78	5.243.750-	5.093.750-
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	45.000.000	50.000.000	70.000.000	92.000.000	6.000.000	27.050.000	21.755.000	38.950.000	60.450.000	6.000.000	60,11	43,51	55,64	65,71	100	9.750.000-	5.262.500-
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	-	-	42.257.700	-	-	-	-	42.257.700	-	-	-	-	100,	10.564.425	10.564.425

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)
Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	526.370.500	769.374.200	1.451.336.964	1.982.485.700	589.636.700	470.945.500	752.627.650	1.385.778.514	1.213.110.200	68.406.700	89,47	97,82	95,48	61,19	11,60	15.816.550	100.634.700-
Peningkatan Kesempatan Kerja	58.320.000	49.580.000	58.321.000	1.066.610.600	162.044.600	58.040.000	47.527.000	56.771.000	955.468.900	159.995.100	99,52	95,86	97,34	89,58	98,74	25.931.150	25.488.775
Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	441.051.500	655.928.000	980.509.000	1.099.240.300	729.569.500	431.435.500	611.565.000	884.412.000	1.005.731.600	716.907.150	97,82	93,24	90,20	91,49	98,26	72.129.500	71.367.913
Jumlah	2.593.776.100	3.436.912.600	5.784.127.264	5.941.293.300	4.055.466.700	2.473.972.597	3.299.696.448	5.480.975.680	4.829.715.972	3.447.047.019	91,35	89,29	89,96	84,73	87,96	380.416.400	354.259.556

Setelah penyajian tabel T-C.24. dapat kita lihat rasio antara anggaran dan realisasi anggaran secara keseluruhan dapat dikategorikan baik.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Dinas Tenaga Kerja meliputi kapasitas SDM, sarana dan Prasarana sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan Diklat Fungsional ;
2. Tersusunnya dokumen perencanaan, meliputi Renstra SKPD, Renja SKPD
3. Tersusunnya dokumen pelaporan dan evaluasi, meliputi ; Laporan Keuangan, Laporan Akuntabilitas Kinerja, Laporan Asset Dinas Sosnakertrans

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan kondisi bidang ketenagakerjaan dan yang merupakan kondisi lingkungan strategis Dinas Tenaga Kerja maka untuk menyusun strategi pencapaian visi dan misi, diperlukan analisis lingkungan internal dan eksternal (SWOT Analisis). Lingkungan internal merupakan Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weaknesses). Lingkungan eksternal meliputi Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threats) masing-masing lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut :

### **1. Lingkungan Internal**

#### **kekuatan (S) :**

- 1) Kewenangan dibidang Ketenagakerjaan
- 2) Adanya Peraturan Perundangan, sistem administrasi dan manajemen ketenagakerjaan serta mekanisme kerja yang sudah ada
- 3) Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia
- 4) Tersedianya anggaran dan SOP pelayanan

**Kelemahan (W) :**

- 1) Jaringan sistem informasi ketenagakerjaan belum tersedia
- 2) Terbatasnya sumber daya manusia profesional
- 3) Sarana Prasarana penunjang kerja belum memadai
- 4) Anggaran yang sangat terbatas
- 5) Kurangnya tenaga fungsional dibidang Ketenagakerjaan

**2. Lingkungan Eksternal****Peluang (O) :**

- 1) Banyaknya organisasi ketenagakerjaan
- 2) Jumlah perusahaan yang berjumlah 143 (Perusahaan kecil, menengah dan besar )
- 3) Adanya Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
- 4) Potensi daerah lain yang menyerap tenaga kerja
- 5) Letak Kabupaten Tanjung jabung Barat yang strategis

**Ancaman (T) :**

- 1) Jumlah pengangguran yang tinggi
- 2) Masih adanya perselisihan hubungan industrial
- 3) Rendahnya kualitas dan daya saing tenaga kerja lokal
- 4) Masih adanya pelanggaran norma dan syarat kerja
- 5) Arus globalisasi informasi yang mempengaruhi sikap dan perilaku generasi muda

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut diatas diperoleh strategi umum (indikasi program) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

**1. Strategi S-O**

- 1) Pembinaan kepada organisasi ketenagakerjaan SP/SB
- 2) Pelatihan SDM (PNS) dibidang ketenagakerjaan
- 3) Meningkatkan keterampilan tenaga kerja
- 4) Meningkatkan peran sosial perusahaan
- 5) Meningkatkan retribusi ketenagakerjaan

## **2. Strategi W-O**

- 1) Pembinaan Lembaga Pelatihan Swasta
- 2) Membuat Jaringan sistem informasi ketenagakerjaan
- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana

## **3. Strategi S-T**

- 1) Meningkatkan keterampilan pencari kerja
- 2) Perluasan lapangan kerja di sektor formal maupun informal
- 3) Peningkatan keselamatan pencari kerja
- 4) Peningkatan hubungan industrial yang harmonis
- 5) Hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga ketenagakerjaan
- 6) Peningkatan fasilitas perbaikan taraf hidup pekerja
- 7) Pembinaan organisasi pekerja
- 8) Meningkatkan penempatan Tenaga kerja

## **4. Strategi W-T**

- 1) Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan ketenagakerjaan
- 2) Pemberdayaan masyarakat dalam pelatihan kerja
- 3) Pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja
- 4) Pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menciptakan Peluang Kerja

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

Dari analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada selama ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi permasalahan utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menjalankan tugasnya pokok dan fungsinya yaitu :

- a. Permasalahan penyelenggaraan Bidang Ketenagakerjaan
  1. Daya serap tenaga kerja pada sektor formal masih rendah, sementara angkatan kerja dengan pendidikan sarjana terus mengalami peningkatan.
  2. Daya saing dan produktivitas tenaga kerja masih rendah, yang ditandai dengan rata-rata penduduk yang bekerja berpendidikan SD yang lebih dari 50%.
  3. Pengakuan standar kompetensi pekerja di sektor non konstruksi masih sangat kurang, sehingga mengancam persaingan di pasar MEA.
  4. Terbatasnya upaya peningkatan kualitas pelatihan tenaga kerja dan terbatasnya anggaran yang bersumber dari APBD, sementara minat pencari kerja untuk mengikuti pelatihan sangat tinggi.
  5. Belum optimalnya peran lembaga pelatihan pemerintah dan swasta dalam menentukan pelatihan kerja sesuai kebutuhan dunia kerja (link and mach)
  6. Tingginya minat pencari kerja untuk bekerja ke luar negeri, namun terkendala dengan persyaratan yang dibutuhkan.
  7. Tingginya minat untuk mengikuti program pemagangan ke luar negeri, namun masih terkendala dengan penguasaan bahasa asing, seperti bahasa inggris, cina dan bahasa jepang serta ketatnya proses seleksi yang dipersyaratkan.
  8. Terbatasnya sumber daya aparatur yang berkualitas dalam menyelenggarakan program-program ketenagakerjaan.
  9. Belum sinerginya arah dan kebijakan dalam mendorong penciptaan kesempatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dilakukan oleh SKPD dan lintas sektor lainnya.

10. Belum optimalnya upaya pengawasan ketenagakerjaan, karena masih terbatasnya fungsional pengawas di Kabupaten, sementara jumlah perusahaan yang harus diawasi cukup banyak.

### **3.2. Telaah Visi Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih**

Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat periode tahun 2016-2021 telah mempersiapkan program-program aksi untuk mengatasi masalah-masalah yang menyangkut hajat hidup masyarakat. Untuk membangun fondasi bagi implemementasi kebijakan sampai dengan tahun 2021, juga telah disiapkan beberapa program strategis untuk menjalankan 4 (empat) misi yang dituangkan dalam agenda Pembangunan Daerah untuk masa pemerintahan lima tahun ke depan.

Dengan mempertimbangkan permasalahan pokok daerah, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Tahun 2016-2021, adalah :

#### **“TERWUJUDNYA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT MAJU, ADIL, MAKMUR, BERMARTABAT DAN BERKUALITAS”**

Makna pokok yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1. Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang Maju**, Merupakan Daerah yang memiliki standar hidup yang relatif tinggi serta ekonomi merata. Meningkatkan pendapatan dan ekonomi masyarakat, PDRB tinggi melalui eksploitasi Sumber Daya Alam, mengembangkan industri yang beragam, dan ekonomi kerakyatan.
- 2. Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang Adil**, adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal baik menyangkut benda atau orang, Meningkatkan anggaran daerah yang prorakyat, terwujudnya pemerataan pembangunan sesuai dengan pengembangan potensi daerah. Penciptaan ruang pembangunan agraria yang lebih adil bagi rakyat, Pelayanan informasi publik yang berimbang dan transparan.

3. **Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang Makmur**, Makmur kehidupan warganya dan melimpah kekayaan wilayahnya ini dapat dilihat dari menurunnya rasio kemiskinan dan terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat
4. **Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang Bermartabat**, Suatu kondisi kehidupan manusia ideal, yakni lengkapnya penghargaan dan pemenuhan segala hak asasi manusia sebagai makhluk yang memiliki harkat dan derajat, kelengkapan itu mampu mewujudkan cipta rasa dan karsanya secara nyata
5. **Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang Berkualitas**, adalah tingkat baik buruknya atau taraf hidup atau derajat hidup masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut diatas, maka ditetapkan 4 (empat) Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2017 – 2021 sbb ;

**Misi I : Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan Infrastruktur dasar dan kawasan ekonomi yang berkualitas**

**Misi II : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup**

**Misi III : Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan**

**Misi IV : Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik**

Dari keempat misi tersebut diatas, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat menitik beratkan pada pencapaian target misi ketiga yaitu Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat melalui Agroindustri dan Perikanan dengan tujuan meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui investasi daerah dan daya serap tenaga kerja dengan sasaran peningkatan daya serap tenaga kerja pada sektor ekonomi kerakyatan.

Untuk mendukung terwujudnya misi tersebut, maka dilakukan kajian dan analisis untuk menetapkan program dan kegiatan selama lima tahun kedepan antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase pelayanan administrasi yang efektif dan efisien di lingkungan dinas
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk peningkatan pelayanan aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase peningkatan disiplin kerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
4. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase peningkatan kualitas aparatur
5. Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase kualitas perencanaan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan program keuangan dan aset
6. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikasi
7. Program Peningkatan Kesempatan Kerja, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase tenaga kerja yang ditempatkan
8. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, kinerja yang ingin dicapai adalah penurunan pelanggaran kasus norma tenaga kerja

### **3.3.Telaah K/L dan Renstra**

#### **3.3.1 Telaah RENSTRA Kementerian Tenaga Kerja**

Kondisi Ketenagakerjaan Indonesia pada posisi bulan Agustus 2015 adalah sebagai berikut :

1. Angkatan Kerja 122,38 (dalam juta orang) atau 65,76 %
2. Pengangguran Terbuka 7,54 (dalam juta orang) atau 6,18 %
  - < SD : 1,43 (18,94%)
  - SMP : 1,87 (18,56%)
  - SMA : 2,28 (30,15%)

SMK	: 1,57 (20,77%)
D I/II/III	: 0,23 (3,32%)
UNIV	: 0,65 (8,65%)

Masalah Utama Ketenagakerjaan adalah dari Jumlah yang bekerja sebanyak 114,82 (dalam juta orang) atau sebesar 93,82 % dengan rincian yang bekerja sebagai berikut :

- > Bekerja tidak penuh (< 34 Jam/minggu) 34,31 (dalam juta orang) atau sebesar 29,88 %
- > Paruh Waktu 24,57 (dalam juta orang) atau 71,61%
- > Setengah Penganggur 9,74 (dalam juta orang) atau 28,39 %
- > Bekerja Penuh (>34 jam/minggu) 80,51 (dalam juta orang) atau 70,12 %

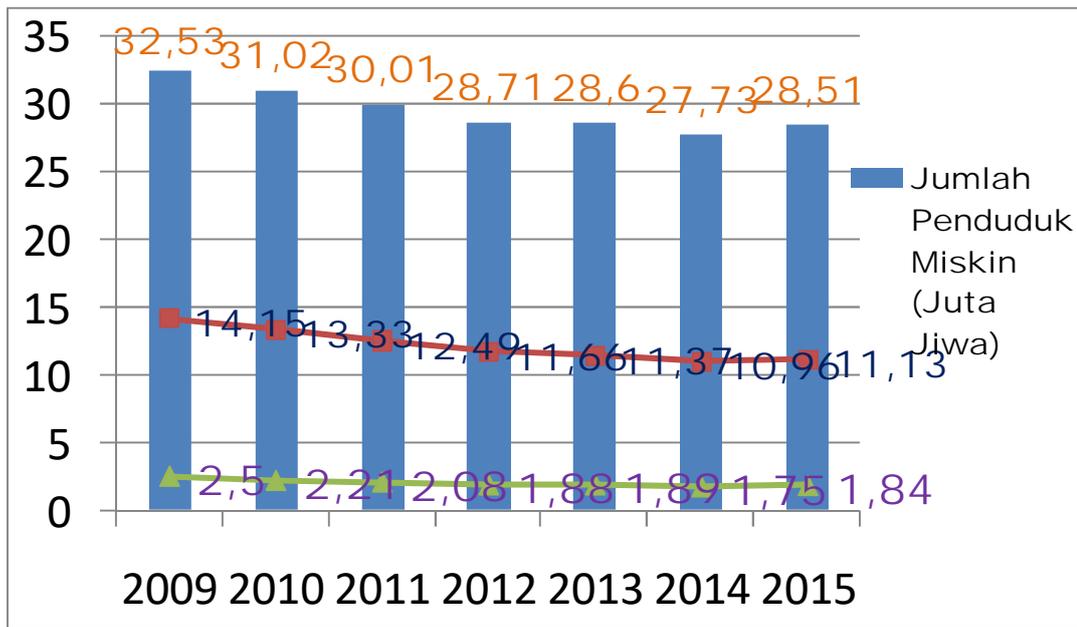
Pada dasarnya ada 2 (dua) agenda prioritas yang menjadi agenda utama pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka mendukung nawa cita pembangunan nasional.

- *Pertama*, menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara melalui perlindungan hak dan keselamatan pekerja migran.
- *Kedua*, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

Kedua agenda prioritas pembangunan tersebut dijabarkan ke dalam Nawa Kerja Ketenagakerjaan. yaitu :

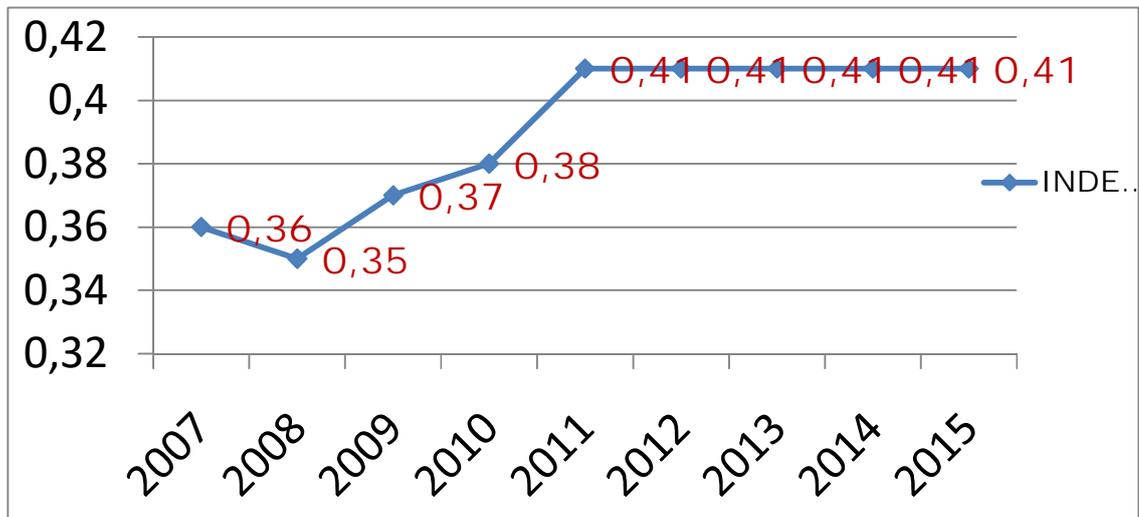
1. penguatan perencanaan tenaga kerja nasional;
2. percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja;
3. percepatan sertifikasi profesi;
4. perluasan kesempatan kerja formal;
5. penguatan wirausaha produktif;
6. penciptaan hubungan industrial yang sehat dan produktif;
7. penegakan hukum ketenagakerjaan;
8. peningkatan perlindungan pekerja migran,dan;
9. pelayanan ketenagakerjaan yang sederhana,transparan dan akuntabel.

**PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DAN INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN TAHUN 2009-2015**



**INDEKS GINI ATAU KOEFISIEN GINI INDONESIA TAHUN**

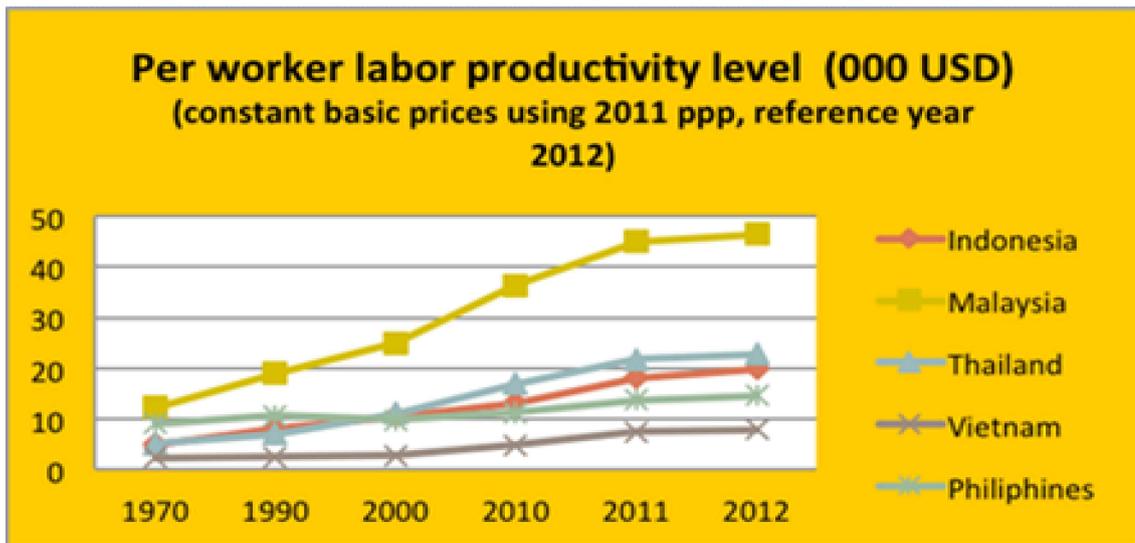
**2007-2015**



Keterangan :

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai indeks 0 hingga 1. Nilai indeks mendekati 0 berarti pendapatan kian merata, sedangkan nilai indeks mendekati angka 1 berarti pendapatan kian timpang.

## PRODUKTIVITAS PERJAM KERJA MENURUT NEGARA TAHUN 2013

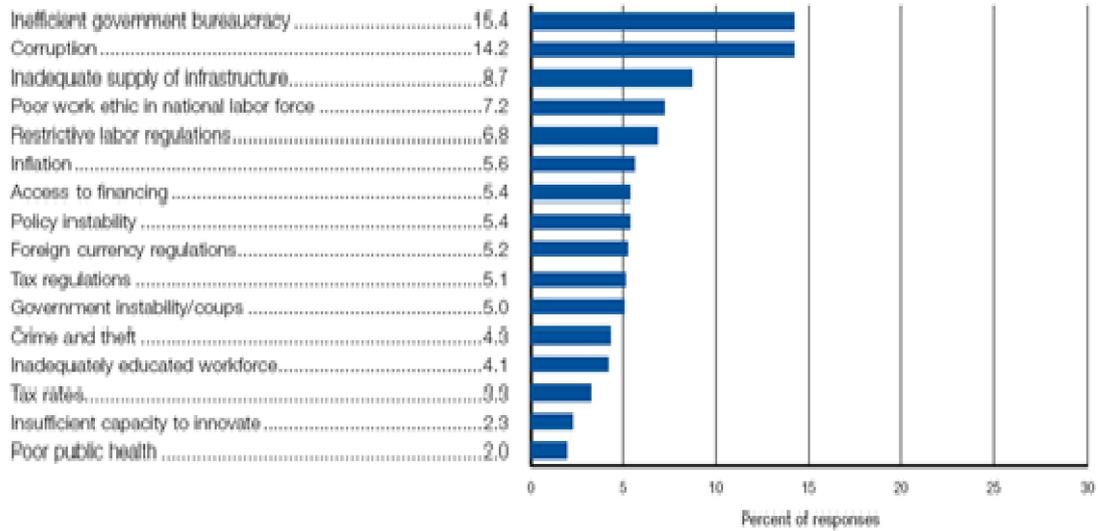


## KONDISI PASAR KERJA INDONESIA



## PERMASALAHAN UTAMA PASAR KERJA INDONESIA

### The most problematic factors for doing business



## VISI, MISI, AGENDA, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Visi Pembangunan 2005-2025 adalah **“Indonesia yang Mandiri, Maju Adil dan Makmur”** yang dibagi dengan 4 (empat) Tahap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yaitu RPJMN 1 tahun 2005-2009, RPJMN 2 tahun 2010-2014, dan sekarang RPJMN 3 tahun 2015-2019 yaitu Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat.

## AGENDA DAN SASARAN PEMBANGUNAN BIDANG KETENAGAKERJAAN

Agenda Pembangunan

1. Penguatan Faktor Utama Pembangunan Ekonomi melalui Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja;
2. Memperbaiki Iklim Ketenagakerjaan dan Menciptakan Hubungan Industrial yang Harmonis.
3. Memperluas Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

## **Sasaran Pembangunan**

1. Tingkat pengangguran terbuka diharapkan sebesar 4,0 - 5,0 persen pada tahun 2019.
2. Memfasilitasi kesempatan kerja sebesar 10 juta selama 5 (lima) tahun.

## **PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN DALAM RANGKA AGENDA DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

### **1. Agenda Prioritas Pembangunan kesatu (Nawacita)**

Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara melalui perlindungan Hak dan Keselamatan Pekerja Migran.

### **2. Agenda Prioritas Pembangunan keenam (Nawacita)**

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional yang dilakukan melalui **peningkatan daya saing tenaga kerja**.

## **Sasaran Bidang Ketenagakerjaan**

1. Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 4,0-5,0 persen pada tahun 2019.
2. Menciptakan kesempatan kerja sebesar 10 juta selama 5 (lima) tahun.
3. Terciptanya perubahan struktur tenaga kerja secara bertahap dari sektor/sub-sektor lapangan usaha yang produktivitasnya rendah ke sektor/sub-sektor yang produktivitasnya tinggi;
4. Meningkatnya jumlah pekerja formal;
5. Meningkatkan jumlah pekerja di sektor industri manufaktur padat pekerja;
6. Meningkatkan jumlah tenaga profesional dan berkeahlian;
7. Terlindunginya pekerja yang rentan terhadap guncangan lapangan kerja dan upah;
8. Tersedianya program perlindungan sosial bagi pekerja;
9. Tersedianya kebijakan pengupahan sebagai payung hukum;
10. Terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara serikat pekerja dan pengusaha;

11. Diterapkannya prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat di perusahaan besar;
12. Meningkatnya kepatuhan perusahaan dalam penerapan standar ketenagakerjaan utama;
13. Tersedianya informasi pasar tenaga kerja yang efektif untuk menghubungkan antara pencari kerja dengan industri;
14. Terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat.
15. Menurunnya jumlah pekerja migran yang menghadapi masalah hukum di dalam dan luar negeri;
16. Terwujudnya mekanisme rekrutmen dan penempatan yang melindungi pekerja migran;
17. Meningkatnya pekerja migran yang memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
18. Meningkatnya peran daerah dalam pelayanan informasi pasar kerja dan pelayanan rekrutmen calon pekerja migran;
19. Tersedianya regulasi yang memberi perlindungan bagi pekerja migran;
20. Terselenggaranya prinsip-prinsip penyelenggaraan jaminan sosial;
21. Terselenggaranya keadilan sosial dalam penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat;
22. Peningkatan jumlah peserta jaminan sosial bagi pekerja.

#### **SASARAN PESERTA JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA**

<b>Uraian</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Pekerja Formal</b>	<b>29,5 Juta</b>	<b>6 %</b>	<b>23,5 %</b>	<b>45 %</b>	<b>70,5 %</b>	<b>100 &amp; 62,4 juta</b>
<b>Pekerja Informal</b>	<b>1,3 Juta</b>	<b>1 %</b>	<b>2,5 %</b>	<b>4,5 %</b>	<b>7 %</b>	<b>10 % 3,5 juta</b>

## PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN DALAM KERANGKA AGENDA DAN SASARAN PEMBANGUNAN WILAYAH

Pembangunan wilayah nasional difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Kalimantan, Maluku dan Nusa Tenggara dan Papua), dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera;

Pembangunan Ketenagakerjaan memperhatikan agenda pembangunan wilayah, khususnya dalam mempersiapkan sumber daya manusia dan iklim ketenagakerjaan yang berfungsi sebagai landasan di dalam upaya pengembangan potensi keunggulan komparatif dan kompetitif daerah.

### E. POTENSI UNGGULAN DAERAH

WILAYAH	POTENSI UNGGULAN
PAPUA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Potensi sektor pertambangan (minyak, gas, emas, perak, nikel dan tembaga);</li><li>• Potensi tanaman pangan (padi, palawija, dan hortikultura);</li><li>• Potensi tanaman perkebunan (kelapa sawit, kelapa, coklat, dan kopi);</li><li>• Potensi peternakan (babi, sapi potong dan kambing);</li><li>• Potensi perikanan tangkap laut dan budidaya laut, tambak, kolam, karamba, jaring apung dan sawah;</li><li>• Potensi industri pengolahan buah merah, kakao dan kelapa; industri pengolahan turunan hasil pertanian dan perikanan; serta industri pertambangan, minyak dan gas;</li><li>• Potensi pariwisata terutama wisata alam bahari dan budaya.</li></ul>
MALUKU	<ul style="list-style-type: none"><li>• Potensi perikanan dan kelautan sebagai salah satu produsen makanan laut terbesar di Asia Tenggara;</li><li>• Potensi pertambangan nikel dan tembaga;</li><li>• Potensi pariwisata bahari.</li></ul>

<p><b>NUSA TENGGARA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potensi pengembangan jagung sebagai tanaman pangan;</li> <li>• Potensi pengembangan peternakan (sapi potong, kambing, babi);</li> <li>• Potensi perikanan tangkap dan budidaya;</li> <li>• Potensi produk kelautan (garam dan rumput laut);</li> <li>• Potensi etalase wisata ekologis, budaya dan bahari serta kepariwisataan yang berbasis UKM;</li> <li>• Potensi pertambangan bijih mangan dan tembaga.</li> </ul>
<p><b>SULAWESI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potensi pengembangan tanaman perkebunan (kakao);</li> <li>• Potensi pengembangan tanaman pangan (padi dan jagung);</li> <li>• Potensi perikanan tangkap dan budidaya;</li> <li>• Potensi penghasil aspal terbesar di Indonesia;</li> <li>• Potensi pengembangan industri nikel, bijih besi;</li> <li>• Potensi sebagai pintu gerbang perdagangan internasional;</li> <li>• Potensi pariwisata bahari.</li> </ul>
<p><b>KALIMANTAN</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potensi pengembangan industri pertambangan (minyak, gas, batu bara, pasir zirkon, bijih besi dan bauksit);</li> <li>• Potensi sektor pertanian adalah pengembangan sumber daya terbarukan (kelapa sawit dan perkayuan);</li> <li>• Potensi pengembangan <i>food estate</i>.</li> </ul>
<p><b>JAWA-BALI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potensi industri pengolahan (makanan-minuman, mebel, tekstil, otomotif, perkapalan, alutsista, telematika, kimia dasar, serta logam dasar);</li> <li>• Potensi sektor pertanian (padi);</li> <li>• Potensi pariwisata dan ekonomi kreatif.</li> </ul>
<p><b>SUMATERA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potensi sebagai lumbung pangan nasional (padi, jagung, kopi, teh, sawit, ikan);</li> <li>• Potensi Pertambangan (batu bara, gas bumi, minyak bumi, bijih timah, bauksit, dan kaolin);</li> <li>• Industri manufaktur, industri kelapa sawit, industri karet, industri pulp dan kertas, industri dasar besi dan baja, industri non-logam serta industri pangan, kopi, kakao;</li> <li>• Potensi kawasan hutan lindung.</li> </ul>

## F. QUICK WINS BIDANG KETENAGAKERJAAN

### I. Perlindungan Pekerja Migran

1. Penyelesaian masalah pekerja migran;
2. Penguatan sistem perlindungan pekerja migran di dalam dan luar negeri;
3. Revitalisasi BLK kabupaten utk pelatihan dan pendidikan TKI sesuai kualifikasi negara penempatan;
4. Pelatihan investasi usaha mikro bagi TKI di Timur Tengah, Hongkong dan Taiwan.

## **II, Peningkatan Daya Saing Masyarakat**

1. Reorientasi BLK menjadi Balai Latihan Kerja dan Kewirausahaan (BLKK);
2. Pembuatan peraturan pemerintah tentang prioritas penggunaan tenaga kerja ahli dan non-ahli domestik/ nasional.

### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN DALAM KERANGKA AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL**

#### **Agenda Prioritas Melindungi Hak dan Keselamatan Pekerja Migran**

1. Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Penempatan;
2. Memperluas Kerjasama dalam Rangka Meningkatkan Perlindungan;
3. Membekali Pekerja Migran dengan Pengetahuan, Pendidikan dan Keahlian;
4. Memperbesar Pemanfaatan Jasa Keuangan bagi Pekerja melalui pengenalan jasa keuangan;
5. Meningkatkan perlindungan melalui peningkatan pengawasan dan peningkatan kesejahteraan serta penyusunan skema asuransi yang efektif.

#### **Agenda Prioritas Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja**

1. Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja;
2. Memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis.

### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN DALAM KERANGKA AGENDA PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI**

1. Memperkuat daya saing tenaga kerja dalam memasuki pasar tenaga kerja global;
2. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan;

3. Meningkatkan akses angkatan kerja kpd sumber daya produktif yg dilaksanakan;
4. Mendorong pengembangan ekonomi perdesaan;
5. Memfungsikan pasar tenaga kerja;
6. Memperluas kerja sama dalam rangka melindungi hak dan keselamatan tenaga migran;
7. Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Penempatan;
8. Membekali pekerja migran dengan pengetahuan, pendidikan dan keahlian;
9. Memperbesar pemanfaatan jasa keuangan bagi pekerja;
10. Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional;
11. Jaminan sosial bagi pekerja penerima upah;
12. Perluasan kepesertaan pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja.

#### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN DALAM KERANGKA AGENDA PEMBANGUNAN WILAYAH**

1. Pengembangan Kawasan Strategis;
2. Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan;
3. Pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan;
4. Penanggulangan Bencana;
5. Pengembangan Tata Ruang Wilayah Nasional;
6. Tata Kelola Pemerintahan dan Otonomi Daerah

#### **REGULASI**

1. Revisi UU Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan;
2. Revisi UU Nomor 21 Tahun 2000, tentang Serikat Pekerja/Buruh;
3. Revisi UU Nomor 39 Tahun 2004, tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
4. Revisi UU Nomor 2 tahun 2004, tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

## **ARAH, STRATEGI DAN SASARAN PROGRAM ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KERJA DAN PRODUKTIVITAS**

### **Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk memasuki pasar tenaga kerja**

1. Harmonisasi standardisasi dan sertifikasi kompetensi melalui kerjasama lintas sektor, lintas daerah, dan lintas negara mitra bisnis, dalam kerangka keterbukaan pasar;
2. Pengembangan program kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha/industri dan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk peningkatan kualitas tenaga kerja;
3. Pengembangan Pola Pendanaan Pelatihan;
4. Penataan lembaga pelatihan berbasis kompetensi melalui pengelolaan program pelatihan yang komprehensif dengan mengembangkan lembaga pelatihan di tingkat pusat sebagai tempat pelatihan unggulan;
5. Peningkatan kualitas sistem tata kelola program pelatihan untuk mempercepat sertifikasi pekerja;
6. Identifikasi dan memilih sektor/sub sektor yang nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja tinggi.

### **STRATEGI PERCEPATAN DAN PENCAPAIAN PROGRAM**

1. Percepatan Penetapan Standar Kompetensi Seluruh Sektor (K/L) dengan menyusun rencana induk pengembangan standar kompetensi, peta kompetensi, standar kompetensi dan pemaketan Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (KKNI);
2. Percepatan Akreditasi Lembaga Pelatihan;
3. Percepatan Penerapan Pelatihan Berbasis Kompetensi di BLK dengan mendorong semua lembaga pelatihan untuk menerapkan pelatihan berbasis kompetensi mengacu pada kualifikasi dan okupasi;
4. Percepatan Sertifikasi Tenaga kerja dan lulusan pelatihan dengan mendorong BNSP untuk membangun infrastruktur sertifikasi di setiap daerah.

**SASARAN PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI  
TENAGA KERJA DAN PRODUKTIVITAS TH 2015-2019**

Indiaktor (RPJM)	Target Jangka menengah				
	Baseline 2014	Target 2019			
Pelatihan Tenaga Kerja (org)	1.921.283	2.170.377			
Sertifikasi Tenaga Kerja (org)	576.887	863.819			
Tenaga Kerja yang memiliki keahlian menengah (%)					
INDIKATOR (RENSTRA)	TARGET				
	2015	2016	2017	2018	2019
1. Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (orang)	79.408	63.772	63.772	63.772	63.772.
2. Jumlah lembaga pelatihan yang terakreditasi (lembaga)	300	380	400	450	470
3. Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi (orang)	152.750	112.338.	126.450.	140.888.	222.750
4. Jumlah tenaga kerja yang meningkat produktivitasnya (orang)	2.180.	9.350.	9.825.	10.025.	10.300.

Program kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, untuk mencetak tenaga kerja dan wirausaha baru yang berdaya saing. Untuk mendukung sasaran program kementerian Tenaga kerja ini Bidang Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam RENSTRA 2016-2021 telah menyusun Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja beserta kegiatannya.

Indikator kinerja dari program ini adalah meningkatnya kualitas pencari kerja dan perluasan kesempatan kerja di kabupaten Tanjung Jabung Barat.

**a. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROGRAM PENEMPATAN DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA**

Peningkatan Kualitas Pelayanan Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja

1. Peningkatan akses angkatan kerja kepada sumber daya produktif;

2. Mendorong Pengembangan Ekonomi Produktif berbasis Masyarakat;
3. Fasilitasi mobilitas tenaga kerja internal dan eksternal, serta memfungsikan Pasar Tenaga Kerja;
4. Perlindungan Pekerja Migran.

#### **STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN PROGRAM**

1. Meningkatkan kegiatan-kegiatan yang bersifat padat karya untuk mengurangi pengangguran kurang terdidik;
2. Mendorong pekerja setengah penganggur untuk melaksanakan usaha produktif dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi tepat guna;
3. Membangun jejaring kemitraan dengan berbagai instansi/organisasi, baik pemerintah maupun non-pemerintah, lembaga pemberdayaan dan pendampingan masyarakat dalam rangka kerjasama di tingkat nasional maupun internasional;
4. Pemberdayaan masyarakat untuk memasuki pasar tenaga kerja dan penerapan model wirausaha serta pendampingan untuk pemberdayaan usaha mandiri.

#### **SASARAN PROGRAM PENEMPATAN DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA 2015-2019**

Indikator (RPJM)		Target Jangka menengah			
		Baseline 2014	Target 2019		
Jumlah Pekerja Formal (%)		40,5	51,0		
Fasilitasi Penciptaan Kesempatan Kerja (juta org)		0	10		
Pengangguran Terbuka (%)		5,9	4-5		
INDIKATOR (RENSTRA)	TARGET				
	2015	2016	2017	2018	2019
1. Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui padat karya	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2. Jumlah tenaga kerja yg diberdayakan melalui kegiatan wirausaha baru	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3. Jumlah pelaku usaha produktif yang menggunakan Tehnologi Tepat	2.500	2.500.	2.500.	2.500.	2.500

Guna					
4.Jumlah tenaga kerja sukarela sbg pendamping	1.660.	1.660.	1.660.	1.660.	1.660.
5.Jumlah penyerapan tenaga kerja pendamping disektor jasa dan industri	55.000	55.000.	55.000	55.000.	55.000
6.Jumlah fasilitasi pempatan tenaga kerja khusus (muda,wanita penyandang cacat, lanjut usia )	1.000.	1.000	1.000	1.000.	1.000.

Untuk mendukung sasaran program dari Kementerian Tenaga Kerja ini Bidang Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabun Barat dalam RENSTRA 2016-2021 telah menyusun Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja beserta kegiatannya. Indikator kinerja dari program ini adalah meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja melalui mekanisme AKL, AKAD, TKWNAP.

#### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROGRAM PENGEMBANGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENINGKATAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA**

Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan

1. Penerapan prinsip-prinsip hubungan industrial dalam bernegosiasi guna mencapai kesepakatan bersama dan penguatan kelembagaan hubungan industrial
2. Peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh melalui penerapan syarat kerja non diskriminasi;
3. Kebijakan pengupahan sebagai payung hukum dengan memperhatikan formula perhitungan berdasarkan produktivitas, pertumbuhan ekonomi, dan pasar tenaga kerja serta mewujudkan

- sistem pengupahan yang berkeadilan melalui penerapan struktur dan skala upah;
4. Peningkatan program perlindungan sosial bagi pekerja/buruh melalui perluasan jumlah kepesertaan program jaminan sosial;
  5. Penerapan prinsip-prinsip hubungan industrial dalam pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan **industrial**.

### **SASARAN PROGRAM PENGEMBANGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN SOSIAL TENAGA KERJA 2015-2019**

Indikator (RPJM)	Target Jangka menengah				
	Baseline 2014	Target 2019			
Kepesertaan Jaminan Sosial					
a. Pekerja Formal (juta orang)	29,5 juta	62,4 juta			
b. Pekerja informal (juta orang)	1,3 juta	3,5 juta			
INDIKATOR (RENSTRA)	TARGET				
	2015	2016	2017	2018	2019
1. Jumlah pelaku hubungan industrial yang mendapat pemahaman hubungan industrial (orang)	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
2. Rasio penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan	85	85	85	85	85
3. Peningkatan kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja (org)	5.600	6.687	7.985	9.535	11.386
4. Jumlah LKS Bipartit yang terbentuk	400	425.	450	500	550
5. Jumlah Perjanjian Kerja Bersama	260	270	280	290	300
6. Jumlah Peraturan Perusahaan	2.050	2.100	2.150	2.200	2.250

Untuk mendukung program dari Kementerian Tenaga Kerja ini Bidang Pembinaan dan Perlindungan Tenaga Kerja melalui Seksi Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja telah menyusun RENSTRA 2016-2021 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga ketenagakerjaan beserta kegiatannya.

## **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROGRAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**

Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan

1. Mengembangkan sistem pengawasan ketenagakerjaan
2. Meningkatkan kualitas teknik pemeriksaan dan penyidikan norma ketenagakerjaan dan K3;
3. Meningkatkan kontribusi penarikan pekerja anak dari bentuk terburuk pekerjaan untuk anak;
4. Meningkatkan kualitas penerapan norma kerja dan jamsostek;
5. Meningkatkan kualitas penerapan norma kerja perempuan dan norma kerja anak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan dan penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja

### **STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN PROGRAM**

1. Penguatan infrastruktur hubungan industrial dalam mewujudkan terselenggaranya desentralisasi hubungan industrial;
2. Perbaikan kerangka hubungan industrial untuk meningkatkan perkembangan serikat pekerja berkualitas dan perundingan bersama;
3. Pengenalan kewajiban hukum bagi semua pihak untuk bertindak berdasarkan itikad baik dalam negosiasi-negosiasi bipartit;
4. Pemberdayaan dan pembinaan serikat pekerja dalam negosiasi-negosiasi bipartit;
5. Peran instansi pemerintah daerah perlu diefektifkan, terutama di wilayah industri, dalam mendorong penguatan lembaga hubungan industrial.
6. Meningkatkan kepatuhan perusahaan/industri terhadap peraturan ketenagakerjaan;
7. Penegakkan hukum bagi pelanggaran peraturan yang dapat merugikan pekerja dan pemberi kerja;

## SASARAN PROGRAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 2015-2019

INDIKATOR (RENSTRA)	TARGET				
	2015	2016	2017	2018	2019
1.Jumlah Perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan (persh)	4.370	4.600	4.800	5.050	5.300
2.Jumlah pekerja anak yang ditarik dari bentuk pekerjaan terburuk anak (org)	16.000	16.500	17.000	17.500	18.0000
3.Jumlah Perusahaan yang menerapkan norman kelembagaan, keahlian dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja(Persh)	190	200	210	220	230
4.Jumlah Pengujian dan pemeriksaan K3 di Perusahaan (Persh)	420	440	460	480	500
5.Jumlah Perusahaan yang menerapkan norma jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan (Persh)	180	190	200	210	220

Untuk mendukung sasaran program Kementerian Tenaga Kerja tentang sasaran program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja telah menyusun dalam Renstra Kab Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021 beberapa Program yang bertujuan untuk perlindungan dan pengawasan tenaga kerja, akan tetapi mengenai fungsi pengawasan kami akan mempedomani peraturan baru dari Kemenaker RI tentang status personil pengawas dan fungsi pengawasan Kabupaten/Kota seperti apa nantinya, tentu akan disesuaikan dengan peraturan yang ada.

### 3.3.4 Telaah Renstra Provinsi Jambi tahun 2016-2021

Visi, Misi dan Program Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 adalah untuk mengatasi masalah-masalah yang menyangkut hajat hidup masyarakat. Untuk membangun fondasi bagi implemementasi kebijakan sampai dengan tahun 2021, juga telah disiapkan beberapa program strategis untuk menjalankan enam misi yang dituangkan dalam agenda Pembangunan Daerah untuk masa pemerintahan lima tahun ke depan.

Dengan mempertimbangkan permasalahan pokok daerah, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan Provinsi Jambi untuk Tahun 2016-2021, adalah :

**TERWUJUDNYA JAMBI YANG TERTIB, UNGGUL, NYAMAN,  
TANGGUH, ADIL DAN SEJAHTERA**  
"JAMBI TUNTAS 2021"

Penjelasan Visi berdasarkan Kata Kunci pada Visi Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut :

VISI	URAIAN VISI
PROVINSI JAMBI YANG TERTIB	Terwujudnya tatakelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan harmonis .
PROVINSI JAMBI YANG UNGGUL	Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas untuk menciptakan ekonomi Jambi yang berdaya saing.
PROVINSI JAMBI YANG NYAMAN	Terwujudnya kehidupan masyarakat Aman, Tenram, dan Damai untuk mendorong iklim investasi dan berusaha yang kondusif
PROVINSI JAMBI YANG TANGGUH	Terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat yang berkelanjutan dan mampu bersaing dalam globalisasi.
PROVINSI JAMBI YANG ADIL	Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata tanpa ada deskriminasi perbedaan individu, golongan maupun wilayah
PROVINSI JAMBI YANG SEJAHTERA	Terwujudnya masyarakat jambi yang mampu memenuhi hak dasarnya baik ekonomi, sosial, politik, budaya.

2) Misi

Sebagai upaya dalam pencapaian visi tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan Provinsi Jambi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah dan desa yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif serta berorientasi pelayanan publik

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender.
3. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat Beragama dan jaminan kepastian hukum.
4. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis dan agroindustri
5. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur umum, Pengelolaan energy dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan.
6. Mengentaskan Kemiskinan dan Pengangguran dengan penciptaan lapangan kerja dan penguatan modal

Prioritas pembangunan Provinsi Jambi lima tahun ke depan sesuai dengan visi dan misi pembangunan tahun 2016-2021, yang dikaitkan dengan Sembilan Agenda Nasional sebagaimana dimaksud dalam NAWACITA, maka program prioritas Pemerintah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

AGENDA NAWACITA	PROGRAM PRIORITAS
Agenda 1 Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi penyelesaian konflik masyarakat antar daerah kabupaten/kota</li> <li>2. Memfasilitasi pembinaan keamanan dan ketertiban; (koordinasi keamanan wilayah di Forkompimda)</li> <li>3. Pembinaan kerukunan dan toleransi anatar suku dan anatar umat beragama</li> <li>4. Pemberian kepastian hukum terhadap haka adat dan hak ulayat masyarakat local dan komunitas adat terpencil serta masyarakat transmigrasi</li> <li>5. Pemberian bantuan hukum dan pendampingan masyarakat kurang mampu guna melindungi hak-haknya sebagai warga negara</li> <li>6. Pembinaan dan pelatihan keterampilan terhadap eks penyandang penyakit masyarakat</li> <li>7. Pembinaan dan perlindungan sosial bagi Penyandang Penyakit Sosial serta korban bencana alam dan bencana sosial lainnya.</li> <li>8. Peningkatan kualitas hukum daerah</li> </ol>

<p>Agenda 2: Akan membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan manajemen pelayanan, dan integrasi pelayanan melalui pengembangan sistem e-government yang terintegrasi dengan kabupaten/kota.</li> <li>2. Peningkatan jangkauan pelayanan dan kualitas pelayanan publik melalui pelayanan satu pintu, PATEN (Kecamatan) dan PATEK (Kelurahan).</li> <li>3. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui keterbukaan informasi publik dan pengawasan pembangunan, pengelolaan dan Pengembangan Aset Daerah.</li> <li>4. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan.</li> <li>5. Peningkatan proporsi belanja publik lebih besar dari belanja aparatur, berserta peningkatan kualitas pengawasan.</li> <li>6. Peningkatan kualitas dan etos kerja melalui perbaikan sistem rekrutmen, promosi, mutasi, dan rasionalisasi.</li> <li>7. Peningkatan Tunjangan Kinerja Daerah</li> <li>8. Peningkatan quota perempuan dalam jabatan pemerintahan dan kedudukan strategis lainnya</li> <li>9. Peningkatan peran dan fungsi legislative</li> </ol>
<p>Agenda 3: Akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alokasi bantuan infrastruktur desa sebesar 200.000.000 per desa (jumlah desa 1389 desa)</li> <li>2. Peningkatan kapasitas aparatur desa melalui peningkatan kualitas SDM Pemerintah Daerah/Desa.</li> <li>3. Fasilitasi kerjasama antar desa antar kabupaten/kota, antar lembaga, dan kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan.</li> <li>4. Tambahan penghasilan bagi aparatur desa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta) pertahun;</li> </ol>

<p>Agenda 5 : Akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan ( Rumah sakit Provinsi dan Rumah Sakit Muaro Bungo dari kelas B ke Kelas A sebagai Rumah sakit rujukan Regional.</li> <li>2. Pembangunan Rumah Sakit Rehabilitasi Provinsi Jambi.</li> <li>3. Pemberian Jaminan Kesehatan gratis bagi masyarakat tidak mampu non Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS).</li> <li>4. Pemberian tambahan penghasilan non guru sertifikasi dan tenaga medis daerah terpencil.</li> <li>5. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan melalui status puskesmas rawat jalan menjadi rawat inap, rawat inap menjadi rawat inap plus serta pemerataan dokter spesialis dan tenaga medis lainnya.</li> <li>6. Penyelenggaraan dan peningkatan kesehatan keluarga dan pemberdayaan masyarakat dan keluarga sejahtera.</li> <li>7. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta kewaspadaan rawan gizi dan pangan.</li> <li>8. Penyelenggaraan kesehatan lingkungan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular.</li> <li>9. Peningkatan pelayanan masyarakat Veteriner dan kesehatan hewan.</li> <li>10. Peningkatan kualitas penyelenggaraan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah baik jalur sekolah dan luar sekolah.</li> <li>11. Peningkatan peran serta masyarakat/swasta dalam penyelenggaraan pendidikan.</li> <li>12. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.</li> <li>13. Peningkatan APM dan APK pada jenjang pendidikan menengah melalui pendidikan gratis.</li> <li>14. Kuliah gratis untuk 15.000 orang anak kurang mampu untuk tingkat sarjana di perguruan tinggi negeri/swasta.</li> <li>15. Pembangunan sekolah kejuruan (SMK, politeknik), <b>Scienc part dan techno part sesuai potensi daerah.</b></li> <li>16. Peningkatan kualitas ketenagakerjaan melalui optimalisasi balai pelatihan kerja, penyediaan fasilitas peralatan, kerja dan instruktur yang berkompeten.</li> <li>17. <b>Perlindungan ketenagakerjaan</b></li> <li>18. Penguatan informasi dan pengetahuan masyarakat tentang kesetaraan gender.</li> <li>19. Pemberdayaan masyarakat miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya untuk memenuhi kebutuhan dasar.</li> <li>20. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.</li> <li>21. Peningkatan kualitas hidup bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Komunitas Adat lainnya.</li> </ol>
<p>Agenda 6: Akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan produktivitas sektor pertanian untuk peningkatan kesejahteraan petani dan mendukung kedaulatan pangan; (peningkatan kapasitas penyuluh, bantuan Alsintan dan sarana produksi)</li> <li>2. Peningkatan nilai tukar petani; (peningkatan kualitas produksi, fasilitasi akses pasar, peningkatan pembangunan jalan produksi, peningkatan keterampilan dan pengetahuan petani) Peningkatan investasi industri pengolahan dan pemberdayaan petani dalam penguasaan teknologi tepat guna; (pemanfaatan hasil inovasi teknologi daerah)</li> </ol>

<p>Agenda 7: Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor- sektor strategis ekonomi domestic</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi melalui pemberdayaan dan pendampingan serta akses permodalan</li> <li>2. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan dan sentra produksi ekonomi masyarakat sesuai RTRW Provinsi, Kabupaten /Kota</li> <li>3. Pengembangan dan promosi industry ekonomi kreatif berbasis komunitas dan komoditas daerah (Kebijakan/regulasi, pembangunan sentra ekonomi kreatif, penyiapan sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas SDM pelaku ekonomi kreatif)</li> <li>4. Peningkatan produktivitas usaha koperasi dan UKM</li> <li>5. Pengembangan usaha produktif bagi warga transmigrasi</li> <li>6. Pengembangan dan penataan pasar rakyat</li> <li>7. Pengembangan usaha industri rumah tangga, kecil dan menengah</li> <li>8. Pengembangan usaha perdagangan dan jasa</li> <li>9. Peningkatan daya saing investasi</li> <li>10. Pengembangan agribisnis perkotaan</li> <li>11. Penyiapan kawasan niaga dan industri yang ramah lingkungan</li> <li>12. Penyiapan kawasan transmigrasi yang terintegrasi dengan kawasan Desa Pertumbuhan.</li> <li>13. Peningkatan pendapatan daerah</li> <li>14. Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah</li> </ol>
<p>Agenda 8: Akan melakukan revolusi karakter bangsa</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan peran lembaga adat dalam pelestarian budaya daerah</li> <li>2. Peningkatan fasilitas penunjang pelestarian seni dan budaya daerah</li> <li>3. Peningkatan pembinaan generasi muda dan seni budaya melalui menumbuhkembangkan seni dan budaya daerah</li> <li>4. Peningkatan fasilitas dan pembinaan olahraga di sekolah menengah di desa/kelurahan</li> <li>5. Pemberdayaan organisasi kepemudaan dan karang taruna</li> <li>6. Pemberdayaan organisasi sosial dan lembaga sosial kemasyarakatan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial</li> <li>7. Pemberian tunjangan kesejahteraan, tunjangan kependidikan dan penghargaan bagi olahragawan daerah yang berprestasi</li> </ol>

a. Pernyataan Visi

Visi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai selama kurun waktu dari tahun 2016-2021, yaitu :

" Terwujudnya Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan dan Ketramigrasian Menuju Jambi TUNTAS Tahun 2021 "

Makna dari pernyataan "Visi" tersebut diatas, sebagai berikut :

1. Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan, mengandung arti bahwa ketenagakerjaan merupakan sumber inventasi ekonomi yang di harus diwujudkan dalam usaha-usaha untuk memperluas kesempatan kerja, mendorong peningkatan produktivitas, daya saing dan kompetensi tenaga kerja serta dapat menciptakan iklim perlindungan kerja yang sehat

dan aman. Tujuan dari visi ini adalah untuk menciptakan peluang kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat Provinsi Jambi, melalui sinergi antar sektor dan stake holder terkait yang akanberimplikasi kepada terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan.

2. Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Ketrasmigrasian, mengandung arti bahwa keterasmigrasian merupakan potensi yang besar untuk di optimalkan kembali untuk mendorong agar tidak terjadi ketimpangan pertumbuhan dan pembangunan antar desa dan kota. Tujuan dari visi ini adalah agar masyarakat transmigrasi dapat meningkatkan pengelolaan potensi dan sumber-sumber daya lokal yang ada di lokasi transmigrasi secara produktif untuk membuka aksesibilitas bagi pusat-pusat pertumbuhan desa dan wilayah serta membuka kesempatan masyarakat untuk ber-transmigasi.

b. Pernyataan Misi

Misi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi merupakan rumusan secara garis besar mengenai cara dan upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh SKPD beserta perangkatnya untuk mewujudkan Visi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi, yaitu :

- a. Misi 1 : Meningkatkan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja.
- b. Misi 2 : Mendorong peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.
- c. Misi 3 : Mendorong peningkatan perlindungan dan jaminan sosial tenaga kerja untuk menciptakan kondisi kerja yang kondusif.
- d. Misi 4 : Mendorong pengembangan kawasan transmigrasi.

## 2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan atau merupakan penjabaran atau implementasi untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis dalam Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang dihadapi.

### a. Tujuan

Adapun Tujuan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi tahun 2016-2021, yaitu :

- 1) Tujuan Penyelenggaraan Bidang Ketenagakerjaan, antara lain :
  - a. Meningkatkan peluang kesempatan kerja sektor formal dan informal dalam dan luar negeri bagi pencari kerja dan angkatan kerja.
  - b. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di Balai Latihan Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota
  - c. Meningkatkan Kualitas Pelatihan Keterampilan Kerja Berbasis Masyarakat.
  - d. Meningkatkan Kualitas dan Pelatihan Keterampilan Kerja Berbasis Kewirausahaan
  - e. Meningkatkan Pelatihan Produktivitas bagi tenaga kerja yang produktif
  - f. Meningkatkan kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan lembaga pelatihan kerja swasta
  - g. Menyelenggarakan Program Pemagangan bagi pencari kerja.
  - h. Melaksanakan akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja.
  - i. Meningkatkan kualitas SDM dalam penyelenggaraan pelatihan kerja
  - j. Meningkatkan kompetensi dalam penyelenggaraan pelatihan kerja.
  - k. Meningkatkan peran Lembaga Perlindungan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
  - l. Meningkatkan ketenangan bekerja dan berusaha bagi tenaga kerja dan perusahaan.

m. Meningkatkan penerapan Norma-Norma Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

- 2) Tujuan Penyelenggaraan Bidang Ketransmigrasian, antara lain :
- a. Mengembangkan wilayah transmigrasi berbasis masyarakat desa.
  - b. Mendorong peningkatan usaha produktif bagi warga binaan transmigrasi.
  - c. Mendorong pengembangan kawasan KTM yang produktif.
  - d. Meningkatkan penyediaan layanan informasi bidang ketransmigrasian

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, dan diharapkan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan dan dapat memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Jambi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun sasaran untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi tahun 2016-2021, yaitu :

- 1) Sasaran Penyelenggaraan Bidang Ketenagakerjaan, antara lain :
- a. Terwujudnya perluasan kesempatan kerja dan berkurangnya pengangguran melalui pemberdayaan tenaga kerja.
  - b. Terwujudnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja pencari kerja yang memiliki kompetensi.
  - c. Terwujudnya ketersediaan pelayanan jaminan sosial tenaga kerja
  - l. Terwujudnya perlindungan tenaga kerja dan peningkatan SDM Tenaga Kerja
  - m. Terwujudnya pembinaan dan pengembangan hubungan industrial dan kesejahteraan tenaga kerja

- 2) Sasaran Penyelenggaraan Bidang Transmigrasi, antara lain :
  - a. Tersedianya kawasan yang bisa dihuni/ditempati warga transmigran yang kondusif.
  - b. Terwujudnya kesejahteraan warga transmigran
  - c. Terwujudnya pusat pertumbuhan dalam mendorong lapangan kerja dan produksi
  - d. Tersedianya informasi yang bisa diakses oleh masyarakat

Adapun Program-program Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jambi selama periode Renstra 2016-2021, adalah sebagai berikut :

#### PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase pelayanan administrasi yang efektif dan efisien dilingkungan Dinas.

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR  
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana untuk peningkatan pelayanan aparatur.
3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR  
Program Peningkatan Disiplin Aparatur, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase peningkatan disiplin kerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan pembangunan.
4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR  
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase peningkatan kualitas aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan pembangunan.
5. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN  
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase

peningkatan kualitas perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan program, keuangan dan asset dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan pembangunan.

6. PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KERJA DAN PRODUKTIVITAS

Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikasi.

7. PROGRAM PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA

Program Pemberdayaan Tenaga Kerja, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase tenaga kerja yang ditempatkan.

8. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENINGKATAN SDM TENAGA KERJA

Program Perlindungan dan Peningkatan SDM Tenaga Kerja, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase penurunan pelanggaran kasus norma tenaga kerja.

9. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA

Program Pembinaan dan Pengembangan Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

10. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase peningkatan penempatan transmigran sesuai calon lokasi penempatan.

Setelah melakukan review terhadap Rentra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi dapat dilihat keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran Renstra SKPD terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Jambi sesuai dengan

urusan yang menjadi kewenangan masing-masing SKPD. Hal ini dapat kita lihat keserasiannya dari Visi dan Misi yang dikaitkan dengan 9 (sembilan) Agenda nasional (Nawacita) serta melihat tujuan dan sasaran jangka menengah dan program-program yang ada pada Dinas Sosnakertrans Prov Jambi, maka dapat dilihat bahwa Dinas Sosnakertrans kabupaten Tanjung jabung Barat sudah sejalan dengan Nawacita dan Program Prioritas Nasional maupun dengan Visi dan Misi Jambi TUNTAS 2021, keterkaitannya dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini :

Agenda Nasional	Prioritas Pembangunan Prov Jambi 2016-2021	Program Prioritas Dinas Tenaga Kerja Kab Tanjab Barat
Agenda Nawacita 5 : Akan Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia melalui Indonesia Pintar, Indonesia Sehat Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera.	15. Pembangunan Sekolah Kejuruan (SMK/Politeknik), Scien Part dan Techno Part sesuai Potensi Daerah. 16. Peningkatan Kualitas Ketenagakerjaan melalui Optimalisasi Balai Pelatihan Kerja, Penyediaan Fasilitas Peralatan, Kerja dan Instruktur yang berkompeten. 17. Perlindungan Ketenagakerjaan	1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 2. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Agenda Nawacita 7 : Akan mewujudkan Kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	7. Pengembangan Usaha Industri Rumah Tangga Kecil dan Menengah	1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Dan dapat dilihat juga tabel 3.1 Komparasi Capaian Sasaran Renstra terhadap sasaran Renstra SKPD Provinsi dan renstra K/L dibawah ini :

Tabel 3.1  
 Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD	Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
1)	2)	3)	4)	5)
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat				
		a. Tersedianya Tenaga Kerja Lokal yang Terampil dan dapat bersaing di dalam pasar kerja b. Terlaksananya Kerja Sama dengan Pemberi Kerja baik untuk Lowongan Kerja, Pelatihan dan Pemberian Kemudahan Akses Penempatan Tenaga Kerja c. Terlaksananya Sosialisasi Pembinaan dan Pengawasan tentang Peraturan Ketenagakerjaan agar dapat dijalankan oleh Pengusaha dan Pekerja d. Terlaksananya Pemeriksaan Berkala terhadap perusahaan	a. Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja dan kurangnya Pengangguran melalui Pemberdayaan Tenaga Kerja b. Terwujudnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja, Pencari Kerja yang memiliki Kompetensi c. Terwujudnya Ketersediaan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja d. Terwujudnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Peningkatan SDM Tenaga Kerja e. Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	a. Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 4,0-5,0 persen pada tahun 2019. b. Menciptakan kesempatan kerja sebesar 10 juta selama 5 (lima) tahun. c. Terciptanya perubahan struktur tenaga kerja secara bertahap dari sektor/sub-sektor lapangan usaha yang produktivitasnya rendah ke sektor/sub-sektor yang produktivitasnya tinggi; d. Meningkatnya jumlah pekerja formal; e. Meningkatkan jumlah pekerja di sektor industri manufaktur padat pekerja; f. Meningkatkan jumlah tenaga profesional dan berkeahlian; g. Terlindunginya pekerja yang rentan terhadap guncangan lapangan kerja dan upah; h. Tersedianya program perlindungan sosial bagi pekerja;

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD	Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
1)	2)	3)	4)	5)
				<p>i. Tersedianya kebijakan pengupahan sebagai payung hukum;</p> <p>j. Terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara serikat pekerja dan pengusaha;</p> <p>k. Diterapkannya prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat di perusahaan besar;</p> <p>l. Meningkatnya kepatuhan perusahaan dalam penerapan standar ketenagakerjaan utama;</p> <p>m. Tersedianya informasi pasar tenaga kerja yang efektif untuk menghubungkan antara pencari kerja dengan industri;</p> <p>n. Terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat.</p> <p>o. Menurunnya jumlah pekerja migran yang menghadapi masalah hukum di dalam dan luar negeri;</p> <p>p. Terwujudnya mekanisme rekrutmen dan penempatan yang melindungi pekerja migran;</p> <p>q. Meningkatnya pekerja migran yang memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pasar;</p> <p>r. Meningkatnya peran daerah dalam pelayanan informasi pasar kerja dan pelayanan rekrutmen calon pekerja migran;</p>

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD	Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
1)	2)	3)	4)	5)
				<p>s. Tersedianya regulasi yang memberi perlindungan bagi pekerja migran;</p> <p>t. Terselenggaranya prinsip-prinsip penyelenggaraan jaminan sosial;</p> <p>v. Terselenggaranya keadilan sosial dalam penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat;</p> <p>w. Peningkatan jumlah peserta jaminan sosial bagi pekerja.</p>

### 3.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan Tugas Pembantuan dibidang Ketenagakerjaan. Dan setelah melakukan review terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033 dapat dilihat keterkaitannya dengan dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat meskipun tidak secara langsung. Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada uraian resume dibawah ini :

#### 1. Bagian Keempat

##### Perwujudan Kawasan Strategis

##### pasal 75 ayat (5) huruf f point 3 yang berbunyi :

Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Modern

Hasil telaahan Kajian Rencana tata ruang dan Lingkungan hidup strategis secara konkrit dapat dilihat pada tabel 3.3. dibawah ini :

Tabel 3.3

Hasil Telaahan Struktur Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Rencana Pola Ruang	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD
1)	2)	3)	4)	5)
1	Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK)	Belum mempunyai Balai Latihan Kerja (BLK).	Menggunakan Tanah Milik Pemda untuk Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK)	- Meningkatkan Penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja -Meningkatkan Kemampuan Tenaga Kerja dengan Sertifikasi Keahlian Profesi

### 3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Setelah melakukan review kembali terhadap faktor-faktor dari pelayanan Dinas Tenaga kerja yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari gambaran pelayanan dan sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian, Maka isu yang akan ditangani melalui Renstra 2016-2021 diantaranya adalah :

#### **Bidang Ketenagakerjaan**

- Masih tingginya pengangguran di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang disebabkan oleh kurangnya lapangan kerja, keahlian tenaga kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja, dan kualitas tenaga kerja relatif masih rendah.
- Masih adanya jumlah perselisihan hubungan industrial (perselisihan hak dan kepentingan)
- Kurang harmonisnya hubungan industrial yang dapat mengganggu produktivitas kerja, kesejahteraan pekerja, ketenangan bekerja dan ketengan berusaha.
- Masih banyaknya perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya dalam Jamsostek (sekarang BPJS –Ketenagakerjaan)
- Masih tingginya pelanggaran norma kerja dan norma K3;

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan merupakan misi sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi dimasa yang akan datang, dengan kata lain nantinya akan mengarahkan jalannya organisasi untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan kegiatan. Tujuan ini juga merupakan langkah pertama dalam proses mencapai keberhasilan dalam implementasi program kegiatan.

Demikian pula Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam hal ini menerapkan tujuan dan sasaran sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

2. Sasaran merupakan proses dari tujuan yaitu apa yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Organisasi dalam jangka waktu tertentu. Sasaran diharapkan dapat lebih spesifik, terukur dan memiliki indikator yang terinci sehingga tercapai secara efektif dan efisien.

**Tabel T-C.25.  
Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADATAHUN KE -					
				1 (TH.2016)	2 (TH. 2017)	3 (TH.2018)	4 (TH.2019)	5 (TH.2020)	6 (TH. 2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Menyediakan tenaga kerja terampil serta menciptakan wirausaha baru	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pencari kerja	Jumlah tenaga kerja terampil	30 Org	30 Org	30 Org	81 Org	40 Org	50 Org
2	Meningkatkan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Peningkatan Penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Jumlah penempatan tenaga kerja yang terdaftar dan siap ditempatkan	200 Org	200 Org	300 Org	300 Org	300 Org	300 Org
3	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis berkeadilan guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam upaya melaksanakan perlindungan tenaga kerja	Peningkatan perlindungan tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja	1. Persentase Jumlah penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan (bila ada kasus )	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			2. Persentase Jumlah perusahaan yang terdata dan terdaftar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	26,66 %	40 %	53,33 %	66,66 %	80 %	100 %
			3. Persentase Jumlah perusahaan yang mengikuti UMK	20 %	20 %	40 %	60%	80 %	100 %

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel T-C.26.  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

<b>VISI : Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas</b>			
<b>MISI II : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelastarian lingkungan hidup</b>			
<b>MISI III : Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1. Menyediakan tenaga kerja terampil serta menciptakan wirausaha baru	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pencari kerja	1. Melaksanakan pelatihan pencari kerja kejuruan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merencanakan jenis pelatihan sesuai kebutuhan pasar guna menambah keterampilan pencari kerja dan meningkatkan penghasilan Keluarga</li> <li>2. Mengeluarkan Izin Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Swasta (LPTKIS)</li> </ol>
2. Meningkatkan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	2. Peningkatan Penempatan tenaga kerjadan perluasan kesempatan kerja	2. Melaksanakan Penempatan Tenaga Kerja Lokal, AKAD dan Monitoring TKWNAP serta Persiapan dan Pembanguna BLK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan informasi pencari kerja kepada pengguna tenaga kerja melalui IPK baik secara manual maupun Online</li> <li>2. Menyalurkan Lulusan (Pencari Kerja) kePerusahaan Melalui Bursa Kerja Khusus (BKK)</li> <li>3. Membuat Rekomendasi Penggunaan Tenaga Kerja AKAD sesuai Permenaker 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja</li> <li>4. Mengeluarkan Rekomendasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKWNAP) berdasarkan Retribusi yang disetor ke Kas Daerah</li> <li>5. Memfasilitasi Pembangunan BLK dengan menyediakan Aset Tahah, Dokumen UKL/UPL dan Studi Kelayakan</li> <li>6. Membangun Balai Latihan Kerja (BLK)</li> <li>7. Melakukan Koordinasi Pelaksanaan pelatihan yang dilakukan oleh BLK dan penyalurkan Lulusan ke Perusahaan dan</li> </ol>

<p>3. Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis berkeadilan guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerjadan Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam upaya melaksanakan perlindungan tenaga kerja</p>	<p>3. Peningkatan perlindungan tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja</p>	<p>3. Menerapkan ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan Pembinaan Hubungan Industrial Tenaga Kerja</p>	<p>Oranisasi Yang Membutuhkan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Pembinaan dan Pemantauan kepada untuk mengikuti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan menerapkan UMK</li> <li>2. Melakukan pembinaan dan verifikasi pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama ( PKB)</li> <li>3. Melakukan Pembinaan untuk mengikuti Norma Kerja dan terlaksananya Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</li> <li>4. Melakukan Pembinaan Organisasi Pekerja, Pengusahan, Lembaga Kerjasama Bipartit dan Tripartit</li> <li>5. Melakukan Falitasi Kebijakan Penerapan Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial</li> </ol>
--	---	---	---

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,**  
**INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program perundang undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai suatu arah pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian Visi, Misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, Visi, Misi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif akan yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, outputs, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

## **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- Penyediaan Media Cetak/Elektronik

## **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- Pembangunan Gedung Kantor
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

## **3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

## **4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

- Pengembangan SDM

## **5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

## **6. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**

- Pelatihan Pecari Kerja Kejuruan Menjahit
- Pelatihan Pencari Kerja Kejuruan Bordir
- Pelatihan Pencari Kerja Kejuruan Elektronik Servis HP
- Pelatihan Pencari Kerja Kejuruan Montir Sepeda Motor
- Pelatihan Pencari Kerja Kejuruan Montir Mobil
- Pelatihan Pencari Kerja Kejuruan Servis AC

## **7. Program Peningkatan Kesempatan Kerja**

- Penempatan Tenaga Kerja Melalui Mekanisme AKL, AKAD dan TKWNAP
- Tahapan Proses Penetapan Lokasi Balai Latihan Kerja
- Studi Kelayakan Pembangunan BLK dan Persiapan Pembangunan Operasional BLK
- Pengendalian TKI Non Prosedural
- Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB)
- Pendataan Tenaga Kerja On Line (BKOL)

## **8. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**

- Pembinaan Sistem Pengupahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- Pembinaan dan Verifikasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- Mekanisme Penyelesaian Peselisihan Hubungan Industrial
- Peningkatan Peran Lembaga Kerja sama Tripartit
- Pembinaan Kelembagaan Sarana Hubungan Industrial di Perusahaan
- Pemberdayaan K3 di Perusahaan
- Pemantauan Upah Minimum dan THR Keagamaan
- Pengendalian Krisis Hubungan Industrial
- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan
- Pembinaan Forum HRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Sedangkan Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.2 dibawah ini.

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Tenaga Kerj Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaaran RPJMD. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel T-C.28

#### Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi kinerja pada periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah tenaga kerja terampil	0 Orang	30 org	30 org	81 org	40 org	50 org	231 org
2	Meningkatnya jumlah pelayanan pencari kerja dan yang ditempatkan	200 Org	200 Org	300 Org	300 Org	300 Org	300 Org	1500 Org
3	Jumlah perusahaan yang dilakukan pembinaan, pengembangan dan penyelesaian serta pendataan perusahaan tenaga kerja	30 Prsh	30 Prsh	30 Prsh	30 Prsh	30 Prsh	30 Prsh	150 Prsh

## **BAB VIII PENUTUP**

Upaya pencapaian visi dan misi pada Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode Tahun 2016 - 2021, diarahkan pada pengembangan sistem Ketenagakerjaan. Upaya tersebut ditempuh melalui berbagai langkah strategi untuk menciptakan "kondisi antara" menuju sistem manajemen yang diinginkan, seperti: mengembangkan sistem informasi ketenagakerjaan dan menegakkan pelaksanaan Peraturan Perundang-Undang bidang tenaga kerja, serta mengoptimalkan seluruh sumber daya Dinas Tenaga kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara bertahap selama lima tahun kedepan agar mampu mendukung pencapaian, mengatasi pengangguran, mengentaskan kemiskinan, membuka lapangan kerja, pembinaan dan perlindungan Ketenagakerjaan.

Rencana strategi ini adalah merupakan rambu-rambu untuk menciptakan kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Tenaga kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat disadari bahwa untuk mengamankan pencapaian sasaran pembangunan dibutuhkan keterpaduan dalam menetapkan kebijaksanaan program, prioritas kegiatan dan alternatif kegiatan serta keterpaduan dukungan kegiatan yang bersumber dari anggaran APBD dan APBD Perubahan, bahkan APBN.

Meskipun disadari bahwa perwujudan Profesionalisme aparatur dan, Ketenagakerjaan bukan hal yang mudah serta tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Tenaga kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat semata selaku institusi Pemerintah Daerah, namun demikian mengingat Dinas Tenaga kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai bagian dari lembaga pemerintah yang mempunyai peran terdepan dalam mengemban amanat pemerintah untuk menyelenggarakan manajemen Ketenagakerjaan, maka Dinas Tenaga kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai kewajiban mengaktualisasikan perannya lima tahun kedepan dalam langkah nyata sesuai kompetensi intinya di bidang Ketenagakerjaan. Apabila Dinas Tenaga kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat mampu membawakan peran nyata di bidang, Ketenagakerjaan sebagaimana diharapkan oleh pemangku kepentingan dan masyarakat, mudah-mudahan Dinas Tenaga kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai institusi pemerintah mampu

terus berkembang menghadapi perubahan lingkungannya dalam menyelenggarakan misinya.

Untuk menjamin terselenggaranya pembangunan Dinas Tenaga kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan tercapainya tujuan dan sasaran sesuai dengan indikator yang diuraikan dalam Renstra ini, maka perlu di ikuti dengan adanya uraian kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun selama periode Renstra, untuk itu sebagai penjabaran lebih lanjut Renstra ini akan di ikuti dengan Penerbitan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Pada setiap awal Tahun Anggaran yang bersangkutan.

Kuala Tungkal,      Desember 2017

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**H. NOOR SETYO BUDI, S.Sos**

Pembina Utama Muda

NIP. 19611106 198503 1 003

**LAMPIRAN**



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Out Come)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2015)	TAHUN												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2021)	SKPD Penanggung Jawab
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
							Target	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	tersedianya makanan dan minuman rapat		12	4.200.000	12	4.200.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	DINAS TENAGA KERJA
			01 01	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	tersedianya biaya perjalanan dinas untuk rapat kordinasi keluar daerah		12	151.132.616	12	200.000.000	12	475.565.650	12	475.565.650	12	475.565.650	12	475.565.650	12	DINAS TENAGA KERJA
			01 25	Penyediaan Media Cetak/Elektronik	tersedianya media cetak dan elektronik		12	5.000.000	12	4.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	DINAS TENAGA KERJA
			02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana			686.444.000		175.602.000		392.372.000		392.372.000		392.372.000		192.372.000		DINAS TENAGA KERJA
			02 06	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor		2	440.800.000			1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	0	-	5	DINAS TENAGA KERJA
			02 09	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor		0	-	1	14.500.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	5	DINAS TENAGA KERJA
			02 13	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor		0	-	1	19.800.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	5	DINAS TENAGA KERJA
			02 20	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor		1	16.000.000	1	12.000.000	1	16.000.000	1	16.000.000	1	16.000.000	1	16.000.000	6	DINAS TENAGA KERJA
			02 22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional dinas		1	213.244.000	1	113.652.000	1	111.372.000	1	111.372.000	1	111.372.000	1	111.372.000	6	DINAS TENAGA KERJA
			02 26	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	terpeliharanya peralatan gedung kantor		1	16.400.000	1	15.650.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	6	DINAS TENAGA KERJA
			03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	persentase peningkatan disiplin kerja aparatur dlm penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan			33.660.000		21.700.000		22.700.000		22.700.000		22.700.000		22.700.000		DINAS TENAGA KERJA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Out Come)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2015)	TAHUN												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2021)	SKPD Penanggung Jawab
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			03 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Terpenuhinya penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		1	33.660.000	1	21.700.000	1	22.700.000	1	22.700.000	1	22.700.000	1	22.700.000	6	DINAS TENAGA KERJA
			05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase peningkatan kualitas aparatur			20.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		DINAS TENAGA KERJA
			05 05	Pengembangan SDM	tercapainya pendidikan dan pelatihan formal		1	20.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	6	DINAS TENAGA KERJA
			06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase kualitas perencanaan, pengawasan pengendalian dan pelaporan program keuangan dan aset			90.150.000		73.431.850		68.851.250		68.851.250		68.851.250		68.851.250		DINAS TENAGA KERJA
			06 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan dan Capaian Kinerja yang terselesaikan		4	90.150.000	4	73.431.850	4	68.851.250	4	68.851.250	4	68.851.250	4	68.851.250	24	DINAS TENAGA KERJA
Menyediakan tenaga kerja terampil serta menciptakan wirausaha baru	Peningkatan kualitas sumber sumberdaya manusia pencari kerja	Jumlah tenaga kerja terampil	15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Terampil			-		222.025.000		202.006.000		334.996.000		358.006.000		454.652.000		DINAS TENAGA KERJA
			15 11	Pelatihan Pencari Kerja Kejuruan Menjahit	Jumlah Pencari Kerja yang diberikan Pelatihan Kejuruan Menjahit			-	30 Org	222.025.000	30 Org	202.006.000	30 Org	202.006.000	30 Org	202.006.000	30 Porg	202.006.000	150 Org	DINAS TENAGA KERJA
			15 xx	Pelatihan Pencari Kerja Kejuruan Bordir	Jumlah Pencari Kerja yang diberikan Pelatihan Kejuruan Bordir			-	-	-		20 Org	132.990.000	-	-	-	-	-	20 Org	DINAS TENAGA KERJA
				Pelathan Pencari Kerja Kejuruan Tatarias	Jumlah Pencari Kerja yang diberikan Pelatihan Kejuruan Tatarias							16 Org	160.000.000							

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Out Come)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2015)	TAHUN											Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2021)	SKPD Penanggung Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Pelathan Pencari Kerja Kejuruan Montir Sepeda Motor	Jumlah Pencari Kerja yang diberikan Pelatihan Kejuruan Montir Sepeda Motor										10 Org	156.000.000					DINAS TENAGA KERJA
				Pelathan Pencari Kerja Kejuruan Las Listrik/ Karbit	Jumlah Pencari Kerja yang diberikan Pelatihan Kejuruan Las Listrik/Karbit												20 Org	252.646.000			DINAS TENAGA KERJA
Meningkatkan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Peningkatan Penempatan tenaga kerjadan perluasan kesempatan kerja	Jumlah penempatan tenaga kerja yang terdaftar dan siap ditempatkan	16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah penempatan tenaga kerja yang terdaftar dan siap ditempatkan			269.700.000	-	634.308.711	-	588.277.350	-	10.771.868.350	-	5.901.868.350	-	5.901.868.350			DINAS TENAGA KERJA
			16 12	Penempatan Tenaga Kerja Melalui Mekanisme AKL, AKAD dan TKWNAP	Jumlah Tenaga Kerja Lokal, AKAD yang ditempatkan dan Monitoring dan TKWNAP	200 Org	200 Org	269.700.000	200 Org	512.040.711	300 Org	138.277.350	300 Org	138.277.350	300 Org	138.277.350	300 Org	138.277.350	1800 Org		DINAS TENAGA KERJA
			16 13	Tahapan Proses Penetapan Lokasi Balai Latihan Kerja	Dokumen Pendukung Persiapan Pembangunan BLK		-	-	100%	122.268.000									100%		DINAS TENAGA KERJA
				Dokumen UKL/UPL, Studi Kelayakan Pembangunan BLK dan Persiapan /Pembangunan /Operasional BLK	Dokumen Pendukung Persiapan Pembangunan BLK dan Terbangunnya Gedung serta Operasional BLK		-	-	-	1 %	300.000.000	49%	10.000.000.000	25%	5.000.000.000	25 %	5.000.000.000	100%		DINAS TENAGA KERJA	
				Pengendalian TKI Non Prosedural	Jumlah TKI Non Prosedural yang di fasilitasi								25 Org	86.945.500	25 Org	86.945.500	25 Org	86.945.500	75 Org		DINAS TENAGA KERJA
				Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah	Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bersamalah								25 Org	76.645.500	25 Org	76.645.500	25 Org	76.645.500	75 Org		DINAS TENAGA KERJA
			xx xx	Pendataan Angkatan Kerja	Data Ketenagakerjaan			-		-			Angkatan Kerja	220.000.000		-		-	Angkatan Kerja		DINAS TENAGA KERJA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Out Come)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2015)	TAHUN												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2021)	SKPD Penanggung Jawab	
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Informasi Pasar Kerja On Line (IPKOL)	Pelayanan Kartu AK I (Kartu Pencari Kerja)							1000 Org	150.000.000	1000 Org	100.000.000	1000 Org	100.000.000	1000 Org	100.000.000	4.000 Org	DINAS TENAGA KERJA
			xx xx	UPTD Balai Latihan Kerja (BLK)	Operasional Pelaksanaan Kegiatan Balai Latihan Kerja (BLK)									150.000.000	50 Org	500.000.000	50 Org	500.000.000	100 Org	DINAS TENAGA KERJA	
Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis berkeadilan guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam upaya melaksanakan perlindungan tenaga kerja	Peningkatan perlindungan tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja	1. Persentase Jumlah penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan (bila ada kasus) 2. Persentase Jumlah perusahaan yang terdata dan terdaftar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan 3. Persentase Jumlah perusahaan yang mengikuti UMK	17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang melakukan Pembinaan, Pengembangan, Penyelesaian Peselisihan HI dan Pendataan Tenaga Kerja			233.280.200		356.300.000		267.515.000		595.903.000		595.903.000		595.903.000		DINAS TENAGA KERJA	
			17 09	Pembinaan Sistem Pengupahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Jumlah Perusahaan yang mengikuti Rekomendasi UMK		30 Prsh	91.685.200	30 Prsh	80.985.000	30 Prsh	57.180.000	30 Prsh	57.180.000	30 Prsh	57.180.000	30 Prsh	57.180.000	150 prsh	DINAS TENAGA KERJA	
			17 10	Pembinaan dan Verifikasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Perusahaan yang melaporkan jumlah tenaga kerja yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan		0	-	20 Prsh	36.660.000	20 Prsh	24.130.000	20 Prsh	24.130.000	20 Prsh	24.130.000	20 Prsh	24.130.000	100 Prsh	DINAS TENAGA KERJA	
			17 11	Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang difasilitasi		0	-	20 Kasus	82.725.000	20 Kasus	34.375.000	20 Kasus	34.375.000	20 Kasus	34.375.000	20 Kasus	34.375.000	100 Kasus	DINAS TENAGA KERJA	
			17 12	Peningkatan Peran Lembaga Kerjasama Tripartit	Dokumen Hasil Kesepakatan		0	-	2 Dokumen	42.055.000	2 Dokumen	61.285.000	2 Dokumen	61.285.000	2 Dokumen	61.285.000	2 Dokumen	61.285.000	10 Dokumen	DINAS TENAGA KERJA	
			17 13	Pembinaan Kelembagaan Sarana Hubungan Industrial di Perusahaan	Meningkatnya Ketaatan Perasahaan		25 Prsh	89.705.000	30 Prsh	89.375.000	30 Prsh	58.985.000	30 Prsh	58.985.000	30 Prsh	58.985.000	30 Prsh	58.985.000	175 Prsh	DINAS TENAGA KERJA	
			17 14	Pemberdayaan K3 di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan K3		20 Prsh	51.890.000	20 Prsh	24.500.000	20 Prsh	31.560.000	20 Prsh	31.560.000	20 Prsh	31.560.000	20 Prsh	31.560.000	120 Prsh	DINAS TENAGA KERJA	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Out Come)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2015)	TAHUN												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2021)	SKPD Penanggung Jawab
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			17 xx	Pemantauan Upah Minimum dan THR Keagamaan	Jumlah perusahaan yang melaksanakan UM dn THR Keagamaan		0	-	0	-	0	-	20 Prsh	49.500.000	20 Prsh	49.500.000	20 Prsh	49.500.000	60 Prsh	DINAS TENAGA KERJA
			17 xx	Pengendalian Krisis Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang dikendalikan Krisis Hubungan Industrial dan Kelembagaan LKS Tripartit		0	-	0	-	0	-	10 Prsh	55.130.000	10 Prsh	55.130.000	10 Prsh	55.130.000	30 Prsh	DINAS TENAGA KERJA
			17 xx	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan Ketenagakerjaan	Peningkatan Pemahaman terhadap peraturan perundang - undangan ketenagakerjaan		0	-	0	-	0	-	4 Dokumen	135.280.000	4 Dokumen	135.280.000	4 Dokumen	135.280.000	12 Dokumen	DINAS TENAGA KERJA
			17 xx	Pembinaan Forum HRD Tanjung Jabung Barat	Terbinanya Forum HRD Perusahaan Perusahaan di Tanjung Jabung Barat		0	-	0	-	0	-	4 Dokumen	88.478.000	4 Dokumen	88.478.000	4 Dokumen	88.478.000	12 Dokumen U52	DINAS TENAGA KERJA
				Jumlah				1.736.496.966		1.955.701.860		2.276.693.760		12.921.662.760		8.074.672.760		7.971.318.760		34.936.546.866